



REVISI

RENCANA STRATEGIS

BAPPEDA PROVINSI RIAU TAHUN 2014 - 2019

BAPPEDA PROVINSI RIAU
TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga perumusan Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ini dapat tersusun dan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

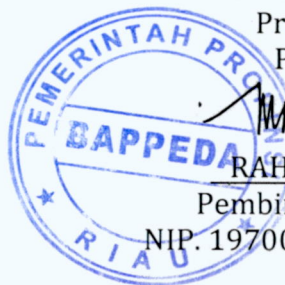
Rencana Strategis Bappeda dirumuskan berdasarkan isu-isu strategis bidang perencanaan, tujuan pelayanan jangka menengah SKPD, sasaran pelayanan jangka menengah SKPD, strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD, perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan.

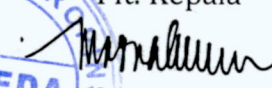
Selanjutnya Perubahan Rencana Strategis yang sudah disusun ini akan dijadikan sebagai acuan utama dalam merencanakan program dan kegiatan setiap tahunnya yang termuat dalam Rencana Kerja (Renja) Bappeda dan juga akan menjadi bahan evaluasi kinerja pencapaian visi Bappeda hingga tahun 2018 yang akan datang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah mendukung tersusunnya Perubahan Renstra ini, terutama kepada seluruh staf Bappeda yang telah berkoordinasi dengan baik sehingga seluruh rangkaian penyusunan Perubahan Renstra dapat dilaksanakan dengan baik.

Pekanbaru, 13 Desember 2016

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Riau
Plt. Kepala




RAHMAD RAHIM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700513 199603 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI RIAU.....	8
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Riau	8
2.2. Sumber Daya Bappeda Riau.....	15
2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Riau.....	23
2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan BAPPEDA Provinsi Riau.....	57
BAB III : ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.....	58
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Riau	58
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih.....	60
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	63
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	65
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	70



BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	71
4.1. Visi dan Misi Bappeda Provinsi Riau	71
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Riau	73
4.3. Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Riau	76
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	80
BAB VI : INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI RIAU MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD PROVINSI RIAU 2014-2018	129
BAB VII : PENUTUP	131
LAMPIRAN	132



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau Berdasarkan Golongan Ruang Gaji Tahun (Per Desember 2016).....	16
Tabel 2.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau Menurut Jabatan Tahun (Per Desember 2016)	17
Tabel 2.3.	Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016	18
Tabel 2.4.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau Menurut Pendidikan Penjenjangan Tahun 2016	20
Tabel 2.5.	Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Bappeda Provinsi Riau s/d Tahun Anggaran 2015.....	21
Tabel 2.6.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Prov. Riau	25
Tabel 2.7.	Review Ketercapaian Program Bappeda 2009-2013	27
Tabel 2.8.	Jumlah Kebutuhan Aparatur Perencana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.....	53
Tabel 2.9.	Data Aparatur Pemprov Riau yang Telah Memiliki Sertifikat Perencana Melalui Diklat Teknis dan Fungsional Perencana s/d Tahun 2016	54
Tabel 2.10.	Analisis Kebutuhan Aparatur Perencana yang memiliki kompetensi Bidang Perencanaan di Bappeda Provinsi Riau (Per Desember 2016).....	55
Tabel 2.11.	Jumlah Aparatur di Bappeda Provinsi Riau yang telah memiliki Sertifikat Perencanaan Dasar maupun Sertifikat Fungsional Perencana s/d Tahun 2016.....	55
Tabel 2.12.	Ketersediaan Data Dasar pada Bappeda Provinsi Riau	56



Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	60
Tabel 3.2.	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi Riau Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2014-2019	63
Tabel 3.3.	Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra K/L dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota.....	65
Tabel 3.4.	Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	67
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2014-2016	74
Tabel 4.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2017-2019	74
Tabel 4.3.	Formulasi dan Perhitungan Indikator	76
Tabel 4.4.	Matrik SWOT.....	77
Tabel 4.5.	Strategi dan Arah Kebijakan.....	73
Tabel 5.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2014-2016	88
Tabel 5.2.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2017-2019	88
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	89



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Keadaan Golongan Ruang Gaji Pegawai Negeri Sipil Bappeda Provinsi Riau Tahun 2016.....	16
Gambar 2.2.	Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/ Esselonering Tahun 2016	18
Gambar 2.3.	Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Bappeda Provinsi Riau Tahun 2016	19
Gambar 2.4.	Tingkat Pendidikan Penjenjangan Pegawai Negeri Sipil Bappeda Provinsi Riau Tahun 2016.....	20



1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada dasarnya harus selaras dengan tujuan nasional, sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Esensi dasar inilah yang dijadikan dasar dalam merencanakan pembangunan, baik pembangunan dalam skala nasional maupun skala daerah dalam satu sistem perencanaan pembangunan nasional.

Undang - Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran RPJMD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rencana strategis (RENSTRA) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, serta pengambilan keputusan untuk mengalokasikan sumberdayanya untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra menyajikan agenda utama pembangunan untuk mengantisipasi permasalahan dan kendala yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan akan timbul sejalan dengan dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global, permasalahan dan tantangan yang dihadapi kedepan yang semakin kompleks.



Arus besar globalisasi membawa keleluasaan informasi, fleksibilitas distribusi barang dan jasa yang berdampak pada munculnya isu-isu yang berdimensi lintas bidang. Percepatan arus informasi dan modal juga berdampak pada meningkatnya pemanfaatan berbagai sumber daya alam yang memunculkan isu perubahan iklim (*climate change*), lintas-batas antardaerah/antarnegara, percepatan penyebaran wabah penyakit, masalah tenaga kerja serta masalah lainnya.

Berbagai masalah tersebut juga mencerminkan rumitnya tantangan yang harus dihadapi kedepan. Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda) yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan di daerah, untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut, peran Bappeda sangat strategis, karena perencanaan merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan di daerah dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 terdapat 5 (lima) tujuan pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: a) untuk mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan; b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antarruang, antarwaktu, dan antarfungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; d) mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan e) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Untuk mencapai kelima tujuan tersebut, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana pemerintah Provinsi di bidang perencanaan pembangunan daerah, harus melaksanakan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) secara optimal dan akuntabel.

Sehubungan dengan telah disusunnya Rancangan Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dan perubahan RKPD Tahun 2014-2016, maka Bappeda Provinsi Riau menindaklanjuti dengan menyusun Perubahan Renstra



Bappeda Provinsi Riau 2014-2019 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda untuk periode 5 (lima) tahunan juga berpedoman pada Rancangan Perubahan RPJMD 2014-2019 tersebut, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renstra BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2014-2018 berdasar pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tk.I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tatacara, Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 9);



15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2014 tentang Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
20. Peraturan Gubernur Riau Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2014;
21. Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2015;
22. Peraturan Gubernur Riau Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau Tahun 2016.
23. Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau.



1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2014–2019 adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi pimpinan dan staf BAPPEDA dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang berhubungan dengan proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan khususnya untuk tahun 2018 dan masa transisi di tahun 2019;
2. Memberikan penyesuaian arah, pedoman penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
3. Memudahkan aparatur BAPPEDA Provinsi Riau dalam merumuskan kembali hal-hal yang memerlukan penyesuaian termasuk pelaksanaan program dan kegiatan secara terpadu, terarah, terukur dan bertanggung jawab.

Adapun Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2014–2019 ini yaitu terciptanya sinkronisasi antar dokumen perencanaan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan serta dapat memudahkan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014 – 2019 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan



BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BAPPEDA
- 2.2 Sumber Daya BAPPEDA Provinsi Riau dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
- 2.3 Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Riau
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BAPPEDA

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BAPPEDA
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Evaluasi RPJMD Provinsi Riau
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Visi dan Misi BAPPEDA
- 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BAPPEDA
- 4.3. Strategi dan Kebijakan BAPPEDA

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

- 5.1. Rencana Program dan Kegiatan
- 5.2. Indikator Kerja

BAB VI. INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII. PENUTUP



GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI RIAU

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Riau

Adanya komitmen nasional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) mendorong Pemerintah untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah melalui penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang dibutuhkan untuk menumbuhkan prakarsa daerah sekaligus memfasilitasi aspirasi daerah sesuai dengan keanekaragaman kondisi masing-masing daerah. Konsekuensi dari hal tersebut adalah Pemerintah Daerah harus dapat lebih meningkatkan kinerjanya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aspek penting dalam upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah adalah melalui kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 209 ayat (1) Perangkat Daerah Provinsi terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan. Pasal 219 ayat (1) menyatakan Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian pengembangan dan fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



(Bappeda) merupakan Badan yang dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan perencanaan.

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, dan dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 pada tanggal 16 Desember 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, pasal 6 menyebutkan bahwa BAPPEDA Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bappeda Provinsi Riau menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sekretariat, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,



Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Mengacu pada uraian tugas dan fungsi, pelaksanaan pelayanan kinerja Bappeda mengerucut menjadi 4 (empat) peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai **(1) pengambil kebijakan/keputusan di bidang Perencanaan** (*policy maker*), **(2) koordinator** (*coordinator*), **(3) Lembaga Pemikir/Kajian/Evaluasi Kebijakan Pembangunan** (*think-tank*), dan **(4) administrator** (*Administration*). Keempat peran tersebut dijabarkan ke dalam pelaksanaan berbagai kegiatan strategis. Sebagai **pengambil kebijakan/keputusan di bidang perencanaan**, Bappeda menentukan kebijakan dan program dalam rencana pembangunan daerah baik jangka panjang (RPJPD), menengah (RPJMD) maupun tahunan (RKPD). Selain tugas perencanaan tersebut, Bappeda juga berperan dalam turut berperan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan penanganan permasalahan yang mendesak dan berskala besar, seperti penanganan pasca bencana alam dan perubahan iklim (*climate change*).

Sebagai **Lembaga Pemikir/Kajian/Evaluasi Kebijakan Pembangunan**, Bappeda melakukan kajian/telaahan/evaluasi kebijakan pembangunan baik sebagai masukan untuk penyusunan rencana pembangunan daerah maupun untuk perumusan kebijakan-kebijakan strategis lainnya. Sebagai **koordinator**, Bappeda antara lain melakukan berbagai kegiatan koordinatif dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik dalam rangka pelaksanaan tugas utama di bidang perencanaan maupun tugas-tugas lainnya dari Gubernur seperti penanganan pasca bencana yang memerlukan koordinasi antar instansi pemerintah dan dengan lembaga lain; koordinasi perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan; koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan daerah, dan pengalokasian dana untuk pembangunan bersama Dinas/Badan terkait; serta koordinasi kegiatan strategis sesuai penugasan.



Selanjutnya sebagai **administrator**, antara lain pengelolaan dokumen perencanaan termasuk bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan atas pelaksanaan rencana pembangunan; penyusunan dan pengelolaan laporan hasil evaluasi; serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan. Selama periode 2009-2013, pelaksanaan keempat peran tersebut telah diupayakan secara optimal. Namun demikian, upaya tersebut masih menyisakan persoalan yang belum sepenuhnya sesuai dengan harapan, antara lain belum sepenuhnya selaras antara rencana pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) dengan pelaksanaannya baik di Kabupaten dan Kota maupun dengan pemerintah pusat. Terkait dengan munculnya berbagai masalah baru dan mendesak, seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan terhadap dampak pemanasan global, dan antisipasi terhadap menurunnya dana bagi hasil minyak bumi akibat menurunnya produksi minyak bumi di Riau, fluktuasi harga bahan bakar minyak, yang mempengaruhi daya beli rakyat, Bappeda dituntut untuk antisipatif dan proaktif serta mampu mengembangkan sistem pendeteksian dini (*early warning system*) sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional tetap terjamin.

2.1.2. Struktur Organisasi

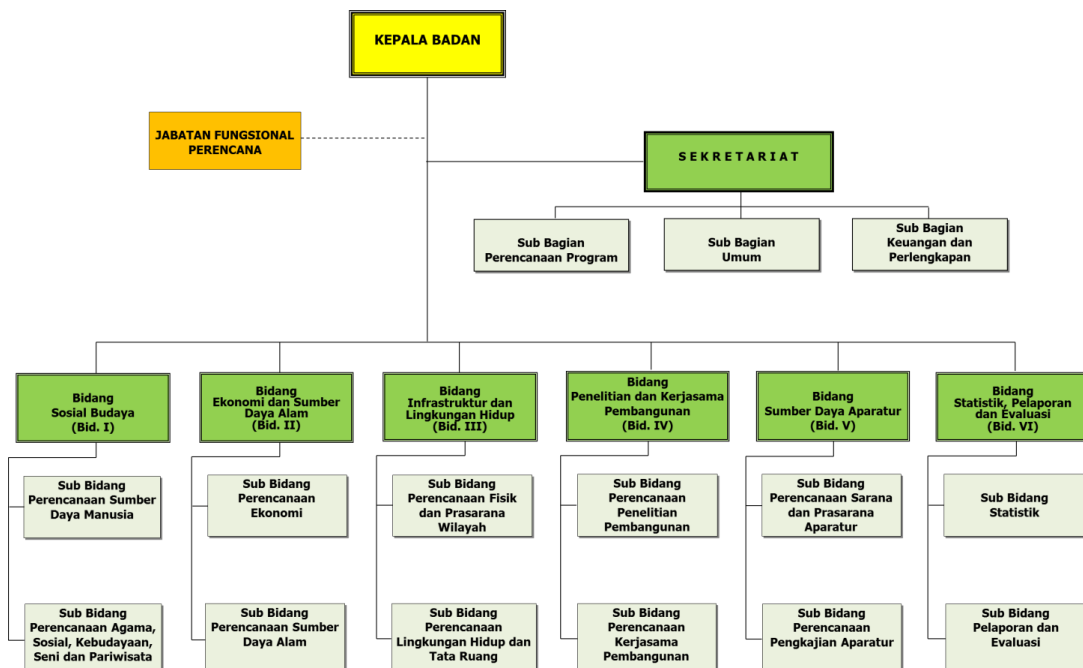
Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah, Kepala Bappeda Provinsi Riau membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 6 (enam) Bidang sebagai berikut :



- A. **Kepala**, mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- B. **Sekretariat**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan dan Perlengkapan dan Subbagian Umum.
- C. **Bidang Sosial Budaya**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Perencanaan Sumber Daya Manusia dan Subbidang Perencanaan Agama, Sosial, Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- D. **Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Perencanaan Ekonomi dan Subbidang Perencanaan Sumber Daya Alam.
- E. **Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Perencanaan Fisik, Prasarana Wilayah dan Subbidang Perencanaan Lingkungan Hidup dan Tata Ruang.
- F. **Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Perencanaan Penelitian Pembangunan dan Subbidang Perencanaan Kerjasama Pembangunan.
- G. **Bidang Sumber Daya Aparatur**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Perencanaan Sarana dan Prasarana Aparatur dan Subbidang Perencanaan Pengkajian Aparatur.
- H. **Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi**, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pada Subbidang Statistik dan Subbidang Pelaporan dan Evaluasi.



Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Riau (Tahun 2014-2016) adalah sebagai berikut :



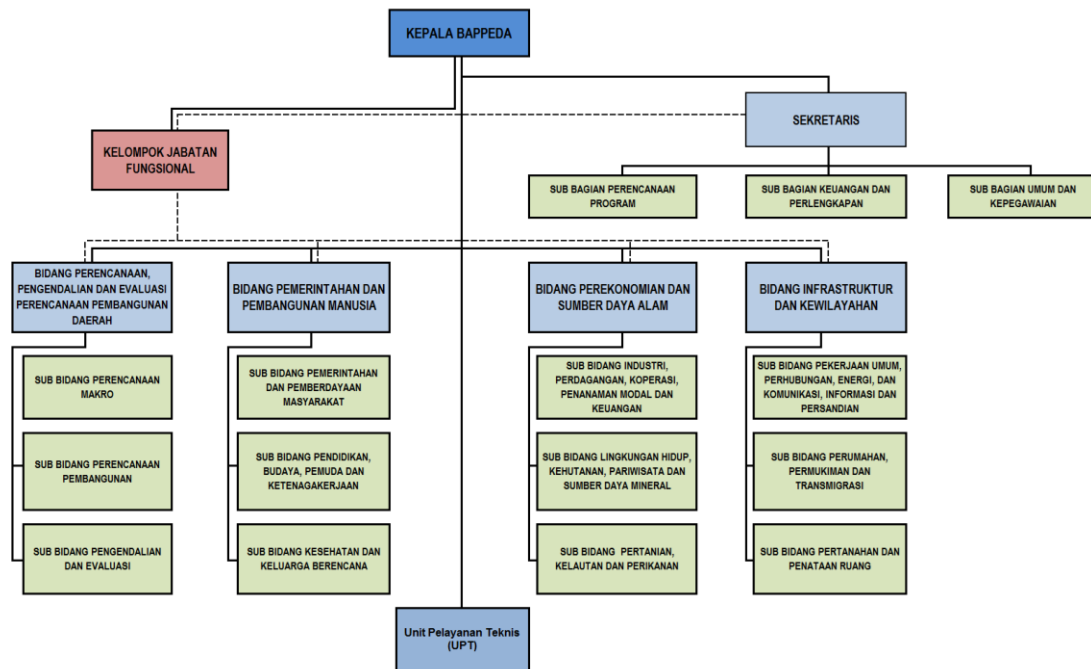
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat, maka setiap Pemerintah Daerah harus menyusun Perangkat Daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut. Pada tahun 2016, Pemerintah Provinsi Riau menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau dan selanjutnya diikuti dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 91 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau maka terbentuk susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau untuk tahun 2017 kedepan dengan Kepala Bappeda Provinsi Riau membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) Bidang sebagai berikut :



- A. **Kepala**; mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah pada bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- B. **Sekretariat**, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Perencanaan Program, Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.
- C. **Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah**, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Perencanaan Makro, Subbidang Perencanaan Pembangunan, dan Subbidang Pengendalian dan Evaluasi.
- D. **Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Subbidang Pendidikan, Budaya, Pemuda dan Ketenagakerjaan, dan Subbidang Kesehatan dan Keluarga Berencana.
- E. **Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam**, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Perdagangan Industri, Koperasi, Penanaman Modal dan Keuangan, Subbidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Pariwisata dan Sumber Daya Mineral, dan Subbidang Pertanian, Kelautan dan Perikanan.
- F. **Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbidang Pekerjaan Umum, Perhubungan, Energi, dan Komunikasi dan Informasi, Subbidang Perumahan, Permukiman dan Transmigrasi, dan Subbidang Pertanahan dan Penataan Ruang.
- G. **Kelompok Jabatan Fungsional**.
- H. **Unit Pelayanan Teknis (UPT)**.



Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Riau sesuai dengan peraturan yang terbaru adalah sebagai berikut :



2.2. Sumber Daya Bappeda Riau

2.2.1. Sumber Daya Aparatur

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, didukung dengan 161 orang Pegawai Negeri Sipil, dengan perincian sebagai berikut:

a. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Golongan Ruang Gaji.

Berdasarkan data pada tabel 2.1. diketahui bahwa Pegawai negeri Sipil di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau didominasi oleh golongan III, yang berjumlah 115 orang atau 71,43%, sedang golongan ruang gaji terkecil adalah golongan I yang berjumlah 2 orang atau 1,24%.

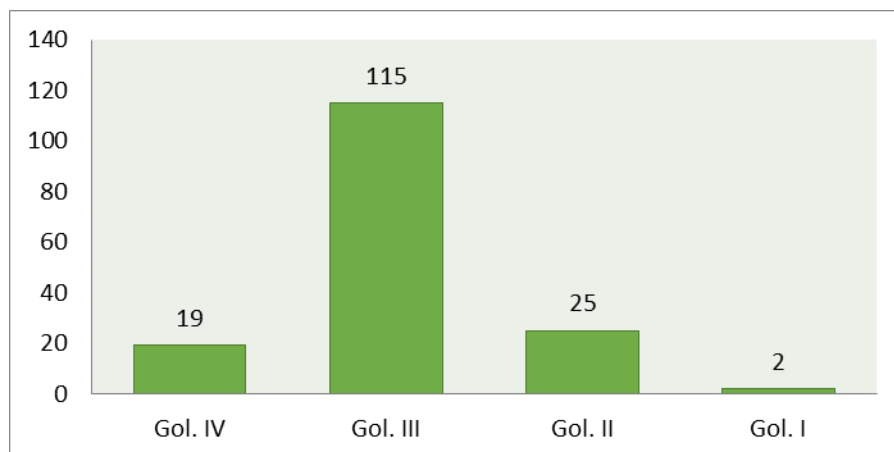


Tabel 2.1
Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau
Berdasarkan Golongan Ruang Gaji
(Per Desember 2016)

NO.	GOLONGAN RUANG GAJI	JUMLAH	%
1.	Gol. IV	19	11,80
2.	Gol. III	115	71,43
3.	Gol. II	25	15,53
4.	Gol. I	2	1,24
JUMLAH		161	100,00

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Provinis Riau

Secara sederhana kondisi Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang gaji dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 2.1. Keadaan Golongan Ruang Gaji Pegawai Negeri Sipil Bappeda Provinsi Riau Tahun 2016

b. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/ Esselonering.

Pegawai Negeri Sipil Bappeda Provinsi yang berjumlah 161 orang, berdasarkan jabatan dan eselonering terbagi dalam 4 (empat) kelompok sebagaimana data pada tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.2



**Keadaan Pegawai Negeri Sipil
BAPPEDA Provinsi Riau
Menurut Jabatan
(Per Desember 2016)**

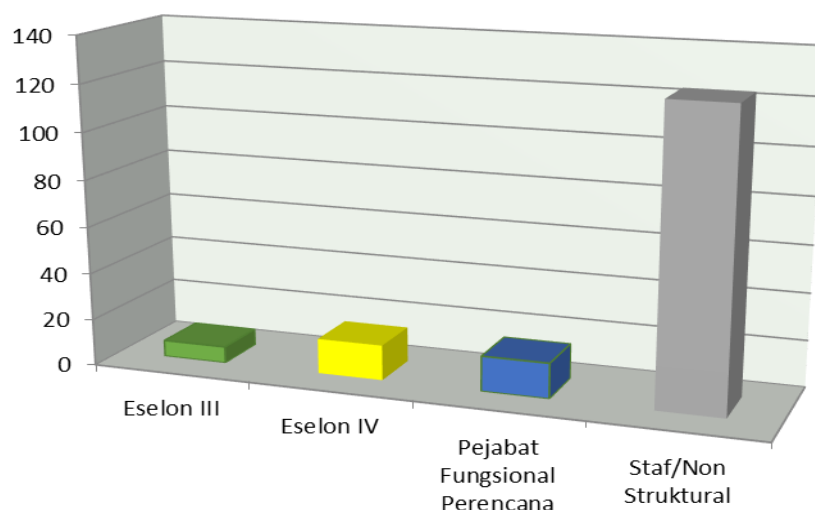
NO.	JABATAN/ESELON	JUMLAH	%
1.	Eselon II	-	0,00
2.	Eselon III	7	4,34
3.	Eselon IV	15	9,32
4.	Pejabat Fungsional Perencana	15	9,32
5.	Staf/Non Struktural	124	77,02
JUMLAH		161	100,00

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Provinsi Riau

Hingga Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ditetapkan, Bappeda belum mempunyai pejabat Eselon II definitif dikarenakan pejabat sebelumnya telah memasuki masa purna tugas sehingga terjadi kekosongan eselon II sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.2 diatas.

Secara sederhana gambaran Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau menurut Jabatan/Eselon dapat dilihat gambar berikut ini.





Gambar 2.2. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan/ Esselonering Tahun 2016

c. Keadaan PNS Menurut Tingkat Pendidikan Formal.

Dari data pada tabel 2.3 diketahui bahwa pendidikan pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, didominasi oleh tingkat pendidikan Sarjana Strata I (S.1) yang berjumlah 94 orang atau 58,39%.

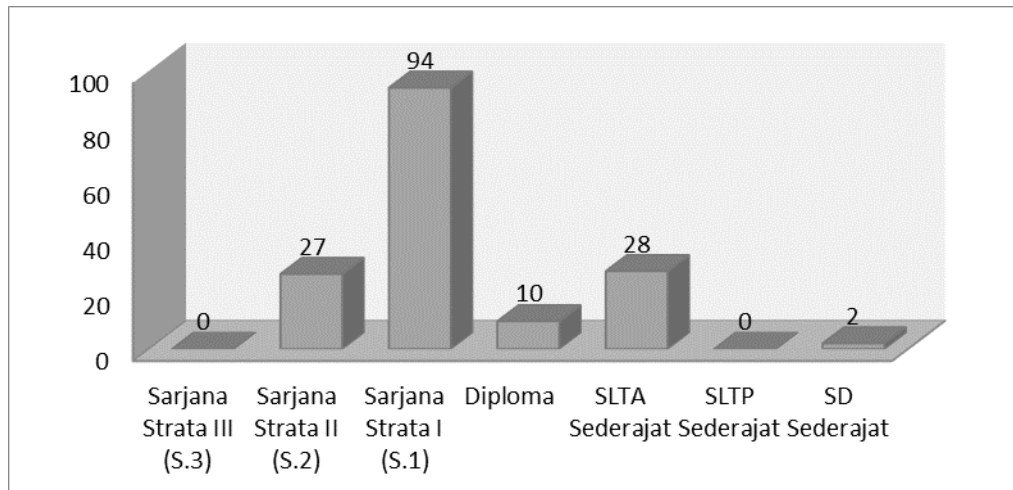
Tabel 2.3
Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2016

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH	%
1.	Sarjana Strata III (S.3)	-	-
2.	Sarjana Strata II (S.2)	27	16,77
3.	Sarjana Strata I (S.1)	94	58,39
5.	Diploma	10	6,21
6.	SLTA Sederajat	28	17,39
7.	SLTP	-	-
8.	SD	2	1,24
JUMLAH		159	100,00

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Tahun 2016



Secara umum tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau cukup baik, dimana dari 161 orang Pegawai Negeri Sipil terdapat 121 orang atau 75,16 % yang berpendidikan Sarjana Strata I, Sarjana Strata II dan Sarjana Strata III. Secara sederhana dapat lihat gambar berikut ini.



Gambar 2.3. Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Bappeda Provinsi Riau Tahun 2016

d. Keadaan Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan Penjenjangan.

Data pada Tabel 2.4. menggambarkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan berjumlah 49 orang.

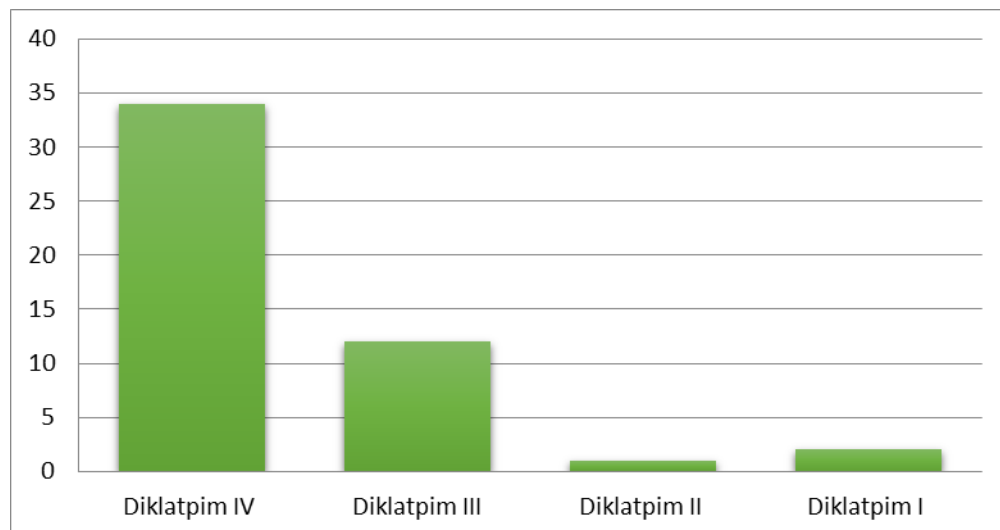


Tabel 2.4.
Keadaan Pegawai Negeri Sipil BAPPEDA Provinsi Riau
Menurut Pendidikan Penjenjangan Tahun 2016

NO.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Diklatpim IV	34
2.	Diklatpim III	12
3.	Diklatpim II	1
4.	Diklatpim I	2
JUMLAH		49

Sumber Data: Daftar Urut Kepangkatan Bappeda Provinsi Riau

Secara sederhana gambaran pegawai negeri sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau yang telah mengikuti pendidikan penjenjangan dapat dilihat gambar berikut ini.



Gambar 2.4. Tingkat Pendidikan Penjenjangan Pegawai Negeri Sipil Bappeda Provinsi Riau Tahun 2016

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau, memiliki 1 (satu) gedung yang terdiri dari 3 (tiga) lantai dan 1 (satu) *basement*. Setiap lantai dan ruangan kerja



Pegawai Negeri Sipil dilengkapi dengan fasilitas pendingin ruangan *Air Condition* (AC). Di setiap ruangan juga dilengkapi prasarana dan sarana kerja berupa meja dan kursi kerja, komputer, printer, mesin photo copy, scanner serta jaringan WiFi, untuk mendukung penggunaan teknologi informasi, sumber data dan literatur dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

Khusus untuk pejabat struktural eselon II dan III untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi disediakan kendaraan dinas atau operasional.

Tabel 2.5
Fasilitas Penunjang (Perlengkapan) Bappeda Provinsi Riau
s/d Tahun Anggaran 2015

NO.	NAMA BARANG	JUMLAH (DALAM BIDANG/UNIT/BUAH)	
1	Bangunan Gedung	1	Unit
2	Komputer PC	116	Unit
3	Global Positioning System (GPS)	2	Unit
4	Mesin Potong Rumput	2	Unit
5	Filling Kabinet	88	Unit
6	Alat Musik (Orgen)	1	Unit
7	Mesin Tik	9	Unit
8	Mesin Penghancur Kertas	18	Unit
9	Note Book	72	Unit
10	PC Tablet	74	Unit
11	Paper Cray	1	Unit
12	Mesin FotoCopy	9	Unit
13	Lemari Kayu	23	Unit
14	Lemari Arsip Besi	24	Unit
15	Lemari Arsip Besi/Rotary	8	Unit
16	Rak Buku	17	Unit
17	Brankas	8	Unit
18	Mesin Poliser	1	Unit
19	Elektronik Wite Board	1	Unit



NO.	NAMA BARANG	JUMLAH (DALAM BIDANG/UNIT/BUAH)	
20	Tong Sampah	17	Buah
21	Alas Meja Makan	40	Lembar
22	Mesin Hitung Uang	4	Unit
23	Kamera	33	Unit
24	Printer	125	Unit
25	Scaner	7	Unit
26	Server Jaringan/Kelengkapan	1	Unit
27	Projektor	31	Unit
28	DVD Player	5	Unit
29	Peralatan Studio/Kelengkapan	10	Unit
30	Mic Meja	113	Unit
31	Handy Cam	6	Unit
32	Blitz Kamera	4	Unit
33	Lensa Kamera	8	Unit
34	Tripod	1	Buah
35	Home Teater	3	Unit
36	Alat Perekam	4	Unit
37	Handy Talky	6	Unit
38	Speaker	6	Buah
39	Facsimili	2	Unit
40	Tiang Baleho	1	Buah
41	Acces Control	2	Unit
42	Gate Barrier	2	Unit
43	Tempat parkir	1	Unit
44	Bendera Hias	30	Lembar
45	Umbul-Umbul	40	Lembar
46	Lukisan	2	Buah
47	Bilboard Foto Dokumen	3	Buah
48	Gong	1	Buah
49	Meja Pimpong	1	Unit
50	Anjungan Informasi	1	Buah
51	Jaringan LAN	1	Set
52	Pagar	70	Meter
53	CCTV	2	Unit
54	Instalasi Listrik	1	Paket
55	Meja Kerja Eselon IV	15	Set
56	Meja Kerja Eselon III	7	Set
57	Meja Rapat Eselon III	3	Set



NO.	NAMA BARANG	JUMLAH (DALAM BIDANG/UNIT/BUAH)	
58	Kursi Kerja Pejabat	25	Buah
59	Kursi Kerja Staf	138	Buah
60	Kursi Rapat	1336	Buah
61	Meja Kerja Staf	130	Buah
62	Meja Meja Proyektor	7	Buah
63	Meja Komputer	11	Buah
64	Sofa Tamu	21	Set
65	Jam Dinding	4	Buah
66	Vakum Cleaner	6	Buah
67	Lemari ES	3	Unit
68	Mesin Potong Rumput	2	Unit
69	AC Unit (Standing)	16	Unit
70	AC Split	66	Unit
71	Exaus Fan	81	Unit
72	Televisi	21	Unit
73	UPS	92	Unit
74	Mesin Pompa Air	11	Unit
75	Tangga	3	Unit
76	Dispenser	4	Unit
77	Alat Rumah Tangga Lain (Piring /Gelas)	35	Lusin
78	Alat Rumah Tangga Lain (TAngki)	2	Buah
79	Alat Rumah Tangga Lain (Kembang)	6	Paket
80	Gorden	1	Paket
81	Tabung Pemadam Kebakaran	25	Buah
82	Buku Panduan, Pengetahuan Umum dan Perundang-Undangan	421	Buah

Sumber : Sekretariat Bappeda Provinsi Riau Tahun 2015

2.3. Kinerja Pelayanan BAPPEDA Provinsi Riau

2.3.1. Evaluasi Kinerja Bappeda Provinsi Riau

Dalam kurun waktu 2009-2013 BAPPEDA Provinsi Riau telah menyelenggarakan pelayanan dibidang Perencanaan secara umum sesuai tugas pokok dan fungsi yang didukung peran aktif aparatur perencana untuk pencapaian dan perwujudan pembangunan yang berkualitas dan berhasil guna.

Penetapan indikator kinerja didasarkan pada tugas pokok dan fungsi, dan belum sepenuhnya menggunakan Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan



pedoman yang ada, dimana hasil evaluasi kinerja SKPD Bappeda dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :



Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Prov. Riau

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	2009	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA DAERAH																	
Belanja tidak langsung																	
- Belanja pegawai	13.198.757.375	14.049.173.557	18.724.116.907	21.546.021.983	23.353.266.700	9.131.270.875	9.981.543.566	16.905.403.807	18.809.582.102	20.869.848.808	69.18	71.05	90.29	87.30	89.37		
- Belanja bunga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Belanja subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Belanja hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Belanja bantuan sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
- Belanja tidak terduga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Belanja langsung																	
- Belanja pegawai	2.566.725.000	3.510.350.000	5.147.611.000	5.604.487.000	7.115.077.000	1.944.395.000	3.044.635.000	4.843.541.500	3.717.947.000	5.765.687.000	75.75	86.73	94.09	66.34	81.03		
- Belanja barang dan jasa	15.133.793.860	19.220.889.150	29.023.384.775	44.171.242.470	56.915.096.950	11.326.297.737	16.996.904.977	25.713.577.567	31.987.825.960	46.773.657.159	74.84	88.43	88.60	72.42	82.18		
- Belanja modal	1.594.965.560	3.189.197.850	3.335.450.500	4.049.117.750	8.223.898.150	1.305.390.448	1.889.144.800	2.922.508.647	3.742.687.000	7.236.142.600	81.84	59.24	87.62	92.43	87.99		
Total	32.494.241.795	39.969.610.557	56.230.563.182	75.370.869.203	95.607.338.800	23.707.354.060	31.912.228.343	50.385.031.521	58.258.042.062	80.645.335.567	72.96	79.84	89.60	77.30	84.35		

Sumber : Sekeratriat Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014



2.3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Rincian evaluasi kinerja kegiatan berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran, maka pencapaian akuntabilitas kinerja BAPPEDA Riau Tahun 2009-2013 dapat dikatakan baik karena rasio setiap tahunnya meningkat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Bappeda Riau adalah prosedur/mekanisme yang semakin baik dan lancar serta progres pelaksanaan program yang terarah dengan percepatan dan pengendalian kegiatan APBD sebagai mana terlihat pada table Review Ketercapaian Program Bappeda 2009-2013 berikut.



Tabel 2.7
Review Ketercapaian Program Bappeda 2009-2013

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target Capaian Kinerja Program dan Kegiatan										Realisasi Capaian Kinerja Program dan Kegiatan									
			2009		2010		2011		2012		2013		2009		2010		2011		2012		2013	
			indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)	indikator	Rp (000)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			4.778.869.960		4.715.487		6.221.465,025		7.601.209,925		9.700.197,900		3.685.567,752		4.524.900,236		5.726.713,487		6.929.076.669,00		8.690.425.894,00
	Penyediaan jasa surat menyurat		100	29.996,5	100	30	100	30	100	30	100	52.125	44,1	13.621	29,50	8.848,5	78,79	23.637	76,18	22.852'5	88,32	46.037,5
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		100	697,8	100	450.000.	100	650.000.	100	679.980.	100	679.980.	79,84	557.972,692	93,70	421.657,961	66,87	434.682,256	63,84	434.114,345	76,40	519.496,538
	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor		100	64.524	100	112.900.	100	144.900.	100	160.800.	100	379	88,53	57.124	99,98	112.880.	83,79	121.411,356,	96,39	154.992.	67,77	265.846.
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan erizinan kendaraan dinas/operasional		100	140.900.	100	152.107,5	100	199.999.	100	240.250.	100	370.000.	43,21	60.880.	98,48	149.801,4	99,35	198.699.	88,34	212.240,45	81,61	301.955,935,
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		100	72.000.	100	97.778.	100	79.800.	100	79.800.	100	100.000.	83,85	60.374,595	88,31	86.343,7	100	79.799,4	100	79.800.	99,85	99.852.
	Penyediaan jasa kebersihan kantor		100	233.030.	100	338.103,5	100	454.244,2	100	711.427,75	100	1.087.928.	96,96	225.952,2	95,72	323.626.	84,73	384.869,4	84,82	603.407,125	77	837.677,633
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		100	112.791,6	100	133.600.	100	149.960.	100	259.920,8	100	250.070.	36,07	40.685.	97,59	130.377.	53,81	80.695.	94,19	244.815.	97,09	242.798.
	Penyediaan alat tulis kantor		100	287.750,32	100	400.000.	100	399.992,5	100	399.991,8	100	550.173,8	99,38	285.966,94	99,42	397.673,75	99,99	399.950,7	99,94	399.748,05	99,88	549.513,86
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		100	296.397,94	100	364.500.	100	349.999,325	100	349.999,575	100	550.531,1	84,42	251.392,675	96,32	351.081,1	99,79	349.248,475	81,06	283.700,663	98,38	541.628,2



	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		100	101.309.8	100	117.842.5	100	150	100	280.090.	100	326.000.	99,91	101.219.6	99,98	117.815.75	98,86	148.289.8	85,22	238.695.	99,84	325.475
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		100	407.905	100	591.900.	100	900.000.	100	1.220.000.	100	1.090.000	83,62	341.070.55	91,86	543.729.	90,86	817.755.	89,54	1.092.350	92,81	1.011.637
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		100	49.999.8	100	145	100	60.000.	100	80.496.	100	200	60,14	30.707.	97,79	141.792	83,00	49.8	97,89	78.797.5	62,12	124.249
	Penyediaan makanan dan minuman		100	245.775	100	292.055.5	100	325	100	324.994	100	414.64	95,25	234.111	85,78	250.529.375	96,76	314.467	97,33	316.313.5	76	315.135
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		100	2.038.69	100	1.489.7	100	2.302.57	100	2.758.46	100	3.499.75	69,87	1.424.490.5	99,94	1.488.744.7	99,90	2.300.309.1	99,89	2.755.455.536	96,51	3.377.539.128
	Pengelolaan Administrasi Kepegawaian						100	25	100	25	100	150					92,40	23.1	47,18	11.795	87,72	131.585.1
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			939.812.56		1.072.245				4.558.172.75				705.340.943		1.023.940.5				3.113.686.58		
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		100	65.9	100	75	100	580.65	100	670.65	100	719.53	25,49	16.8	83,46	62.595	76,53	444.391	91,82	615.798	56,96	409.815.6
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor		100	204.55	100		100	830.4	100	718.4	100	1.609.230	77,99	159.531.338			88,59	735.682	95,49	685.971	97,39	1.567.165.5
	Pengadaan Mebeleur		100	73.610.56	100		100	74.980.5	100	204	100	627.8	46,95	34.560.560			95,82	71.85	96,79	197.45	99,25	623.063
	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas				100	400	100	570	100	200					95,53	382.114	81,85	466.534	62,19	124.375		
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		100	150	100	190	100	500	100	1.926.600	100	1.562.000	86,59	129.882	93,74	178.1	87,90	439.514	35,76	688.924.98	96,75	1.511.206
	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan		100	73.552	100	79.395	100	69.75	100	69.4	100	150	95,92	70.55	99,33	78.866.5	67390	67.39	92,79	64.395.35	69,51	149.026.016
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional		100	100	100	151.5	100	175	100	174.2	100	214.4	96,33	96.33	97,34	147.463	100	142.056.5	97,89	170.527.85.	98,60	211.397.451



	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor		100	100	100	64.000.	100	100	100	100	100	155	54,23	54.225	98,20	62.85	37,11	37.105	80,18	80.175	99,98	154.974
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		100	100	100	74.1	100	75	100	75	100	155	77,56	77.560,045	99,81	73.957	93,88	70.41	99,98	74.983	82,11	127.272.5
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur		100	72.200.000	100	38.250.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	75.000.000,00	91,28	65.902.000	99,33	37.995.000,00	99,63	19.925.000,00	100	20.000.000,00	98,93	74.200.000,00
	Pengadaan kendaraan dinas/ operasional										100	425									94,50	401.621.5
	DED Rehab Gedung Kantor								100	199.999.125									97,51	195.017.9		
	DED Prasarana Ibadah Kantor Bappeda Provinsi Riau dan Komplek Gubernur								100	199.923.625									98,07	196.068.5		
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			189.9		151.5		92.75				182.5		177.903.825		144.655.5		62.6				146.854.15
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya		100	67.35	100	75.75					100	91.25	96,33	64.877.175	95,84	72.6					89,36	81.54
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		100	72.9	100	75.75							89,41	65.176.65	95,12	72.055.5						
	Pengadaan Pakaian Olahraga dan Kelengkapannya						100	92.75									67,49	62.6				
	Pengadaan Pakaian Korpri		100	49.65							100	91.25	96,37	47.85							71,58	65.314.15
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			313.9		474.72		224.9		1.255.720		991.7		80.527		441.747.35		184.786		784.115.6		917.648.9
	Pendidikan dan pelatihan formal		100	237.94	100	225	100	174.9	100	424.92	100	537.500.	8,44	19.677	95,82	215.6	77,53	135.602	89,78	381.495	92,06	494.8
	Pembinaan Mental/Rohani/Jasmani				100	49.72	100	50	100	80.8	100	97.2			99,88	49.661.6	98,37	49.184	93,87	75.85	88,89	86.4
	Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Aparatur Perencana				100	200					100	200			88,24	176.485.75					94,98	189.95



	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja bagi Aparatur Eselon II dan III Pemerintah Provinsi Riau								100	600									30,42	182.492.6		
	Penyusunan Beban Kerja, Peta Jabatan dan Analisis Jabatan Bappeda Provinsi Riau								100	150									96,19	144.278		
	Sosialisasi Permendagri NO. 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah pada Bappeda Provinsi Riau										100	157									93,31	146.498.9
	Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan		100	75.96									38,76	60.85								
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan			56.000.		100				50		450		15.851		90.033.8				23.000.		394.642.95
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		100	40	100	50							-	86,20	43.1							
	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun		100	16	100	50			100	50.000.	100	50.000.	99,07	15.851	93,87	46.933.8			46,00	23	87,35	43.675
	Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD										100	250									88,57	221.412.5



	Rapat Teknis Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau										150.000.										129.555.45	
	Program Pengembangan Data/Informasi			814.447.7		2.643.475		5.363.396.35		4.684.449.75		4.693.920		786.252.275		2.121.926.845		4.831.209.502		3.980.515.811		3.781.632.8
	Peningkatan Jaringan Intranet di Bappeda Provinsi								100	925.000.	100	950							95,85	886.630.75	59,43	564.541.9
	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan		100	500	100	665	100	650	100	860			98,32	491.579.875	63,73	423.781.85	97,29	632.361.55	82,20	706.925		
	Penyusunan Dokumen Analisis Statistik Perencanaan						100	158									91,30	144.258.6				
	Pengelolaan Data Berbasis Sistem Informasi						100	150									96,17	131.45				
	Penyusunan Dokumen Perhitungan dan Analisis Kemiskinan Provinsi Riau								100	200									96,83	193.668.761		
	Pengembangan Sistem Informasi Data Pembangunan								100	349.75									93,63	327.467.2		
	Penyusunan Profil Daerah				100	249.95									93,62	234						
	Pencetakan Buku Hasil-hasil Penelitian				100	200									82,76	165.522.5						



	Peningkatan Pemerataan Jaringan LAN di Bappeda Provinsi Riau				100	158.525	100	350.000.							88,43	140.186.995	92,49	323.697.927				
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi				100	200	100	299.1	100	300	100	473.92			61,92	123.83	97,09	290.408.9	91,08	273.252.5	76,45	362.293.8
	Partisipasi dan Pelaksanaan Pameran Tahunan Provinsi Riau		100	100	100	75	100	175	100	200	100	275	82,99	82.986.7			84,28	147.489.525	93,65	187.299.2	94,84	260.797.8
	Pengadaan Perangkat GIS				100	800									92,91	743.243.9						
	Studio Infrastruktur dan Lingkungan Hidup				100	95									97,82	92.932.9						
	Presentasi Gubernur Riau di Bidang Perencanaan				100	200									99,21	198.428.7						
	Kajian Pengembangan Agrobisnis Kelapa Terpadu dalam rangka Peningkatan Pendapatan Petani Kelapa di Indragiri Hilir								100	550									97,98	538.910.5		
	Konsolidasi Pengukuran Ketahanan Nasional Wilayah di Daerah								100	249.699.75	100	300							89,93	224.584.5	79,73	239.181.8
	Penerbitan Majalah Perencanaan Pembangunan Daerah di Provinsi Riau								100	300	100	450							90,99	272.978.8	93,60	421.189



	Perhitungan Karbon Sink Cagar Biosfer Giam Siak Kecil / Bukit Batu							100	750									49,17	368.798.95		
	Survey Besaran Pengeluaran Sektor Publik Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Prov. Riau						100	700									98,61	690.249.5			
	Survey Persepsi Masyarakat Terhadap Transaksi Ekonomi di Prov. Riau						100	800									98	783.975			
	Penyusunan Input-Output Ekonomi Regional Prov. Riau						100	1.500.000									78,90	1.171.290			
	Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010						100	481.296.35									87,42	420.746.5			
	Pembuatan Visualisasi Profil Bappeda Provinsi Riau						100	100									95,28	95.282			
	Penyusunan Dokumen Data dan Informasi Perencanaan Daerah Provinsi Riau									100	400									77,01	308.044.5
	Pembangunan Sistem Aplikasi Tata Naskah Dinas									100	500									85,94	429.694.85



	Penyediaan Buku Agenda Bappeda Prov. Riau									100	495									88,47	437.903
	Penyusunan Data Statistik Provinsi Riau									100	850									89,17	757.986.15
	Pembangunan Jaringan Hotspot di Bappeda Provinsi Riau		100	214.447.7								98,71	211.685.7								
	Program Kerjasama Pembangunan			1.02		1.133.380	3.184.294.5		3.054.663.5		2.387.320.5		899.83		961.241		2.820.537		2.230.306.912		1.631.193.474
	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah & Konsultasi Regional OP Pengairan Wilayah I		100	50	100	50	100	100	300	100	275	98,05	41.891	85,45	42.725	96,59	96.588.5	92,14	276.433.5	77,93	214.294.7
	Kerjasama Ekonomi Sub Regional, Antar Daerah & Antar Negara					100	500									69,12	345.602.1				
	Operasional Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Prov. Riau					100	534.31									84,60	452.046.6				
	Operasional Pelaksanaan Tim Percepatan Klaster Industri Hilir Kelapa Sawit dan Kawasan Ekonomi Khusus					100	199.984.5									95,15	190.276.5				
	Pengendalian dan Koordinasi Pelaksanaan Program Nasional Bidang Perumahan Rakyat							100	350									78,65	275.267.3		



	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah dan Antar Negara		100	400	100	550			100	728.733	100	1.280.320.5	80,72	322.898	75,37	414.516			67,38	491.001.4	56,49	723.200.774
	Evaluasi Efektifitas Sharing Program Antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Prov. Riau Tahun 2011 dan Strategi Perencanaan Sharing Program Tahun2013								100	215.607.97									95,98	205.117.9		
	Rintisan Pengembangan Kawasan Agropolitan Provinsi Riau Tahun 2012								100	550									98,97	544.345.6		
	Perencanaan Pengembangan Sektor Unggulan dalam rangka Menunjang Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Provinsi Riau dengan Pendekatan Input-Output Multiregional								100	28.451.05									100	28.451.05		
	Koordinasi Implementasi Program Corporate Social Responsibility Dunia Usaha Provinsi Riau								100	250	100								90,68	226.693.3		



	Tindak Lanjut Pertemuan Gubernur Se- Wilayah Sumatera Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol I Sumatra Tahun 2012							100	450	100	450							5,58	25.132.4	82,07	369.314.3
	Bimbingan Teknis Hubungan Kerjasama Pemerintah Daerah dan Luar Negeri							100	181.871.5									86,80	157.864.462		
	Tindaklanjuti dan Persiapan Forum Gubernur Se Wilayah Sumatera				100	533.38	100	150						94,49	504	93,99	140.979.3				
	Kerjasama Pembangunan Antar Negara dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup						100	1.700.000								93,83	1.595.044.				
	Evaluasi Efektifitas Sharing Program Antar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota Se- Provinsi Riau									100	232									84,61	196.283.7
	Rapat koordinasi Persiapan CMGF dan SOM-MM										150									85,40	128.1
	Pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur se Wilayah Sumatera		100	570								93,87	535.041								
	Program Pengembangan Perbatasan Wilayah																				
	Sosialisasi dan Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan		100	221								79,28	175.205								



	Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar					1.450.000		475		1.000.000		650				226.093		422.882		815.131.725		337.657.75
	Koordinasi Pelaksanaan Program PZKP		100	86.35	100	100							90,33	85.45	84,40	84.4						
	Koordinasi Pelaksanaan Program PAMSIMAS		100	94.6	100	150	100	275	100	350	100	325	76,28	72.165.5	94,46	141.693	90,09	247.759.8	95,16	333.063.825	56,03	182.091.45
	Penyusunan Program Skala Prioritas Pembiayaan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau				100	1.200.000									0	-						
	Koordinasi Pelaksanaan Program PNPM mandiri Perkotaan						100	200	100	350	100	325					87,56	175.122.2	65,32	228.629.8	47,87	155.566.3
	Analisis Kapasitas Drainase dan Jalan Raya di Pekanbaru dengan Menggunakan Maksimum Flow Technique (Studi Kasus Dalam Perencanaan Strategis Manajemen Infrastruktur Pemerintah)								100	300									84,48	253.438.1		
	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah			4.525.549.95		2.101.631.9		2.425.000		5.423.530.308		4.759.600		2.825.603.22		1.867.461.8		2.281.318.573		3.267.833.812		4.135.325.001
	Grand Desain Aplikasi Naskah Dinas						100	150									78,14	117.204.5				
	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana		100	657.95	100	808.803.2	100	880	100	950	100	1.000.000	97,74	643.1	98,77	798.853.2	97,88	861.370.9	90,67	925.749	88,93	889.290.4
	Workshop Penyusunan Renstra SKPD Prov. Riau						100	200									97,62	195.230.8				



	Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Bappeda	100	888.124.95									72,70	645.648.7								
	Penyempurnaan RTRW Provinsi Riau 2007-2026 sebagai Implikasi terbitnya UU No. 26/2007 Tentang Penataan Ruang	100	2.789.775									48,77	1.360.436.52								
	Bimtek dan Seleksi Tenaga Lelang		97.55									87,15	85.018								
	Barang dan Jasa Bappeda Provinsi Riau																				
	Penyusunan dan Sosialisasi SOP dan SPP Penyusunan RENJA, RKPD dan PPAS SKPD Pemerintah Prov. Riau					100	300								97	291.03					
	Bimtek dan Koordinasi Penyusunan Perencanaan Berbasis Kinerja (Penja, RKT dan IKU)					100	195	100	200						97.4	189.975.4	75.9	151.779.100,00			
	Peningkatan Kemampuan Analisa Statistik dan Pendataan Bagi Aparatur					100	200								92.2	184.422.5					
	Pelatihan Penyusunan Input-Output Ekonomi Regional							100	200								96.8	193.688.761			
	Peningkatan Kerjasama Fasilitas dan Fungsi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu							100	1.100.000								33.5	368.798.95			
	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas SDM Perencanaan di Provinsi Riau							100	65								83.8	54.532.63			
	Pelaksanaan Kegiatan Achievement Motivation Training					100	250	100	350						96.6	241.580.4	94.7	331.439.9			
	Kajian Pengembangan Sistem Jaringan Transportasi di Provinsi Riau Program MP3EI							100	973.530.308								77,71	756.496.3			
	Sosialisasi Pemahaman tentang Cluster Industri Hilir Kelapa Sawit untuk Mendukung Program MP3EI							100	750								56,68	425.116.276			



	Bimbingan Teknis tentang Perencanaan Pembangunan Daerah				100	390.428.7								65,14	254.205.7							
	Updating Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Administrasi Bappeda				100	250								91,94	229.844.9							
	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan di Provinsi Riau					100								88,35	88.35							
	Penerapan, Evaluasi dan Audit ISO9001:2000 Bappeda Provinsi Riau		100	92.15	100	216.05	100	250	100	250	100	270	99,19	91.4	86,60	187.11	80,20	200.504.073	24,09	60.232.7	76,06	205.364.6
	Peningkatan Kemampuan Analisa Statistik dan Pendataan bagi Aparatur				100	136.35								86,36	117.75							
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas dan Motivasi Aparatur Perencana				100	200					100	289.6		95,67	191.348					95,82	277.503	
	Workshop Penyusunan Dokumen RPJMD dan Renstra SKPD Provinsi Riau										100	650								80,36	522.331.3	
	Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencanaan Aparatur										100	1.250.000								91,20	1.139.947.601	
	Bimbingan Kemampuan Tim Building Aparatur Perencanaan Provinsi Riau										100	700								89,61	627.263.8	
	Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja Bagi Aparatur										100	600								78,94	473.624.3	



	Program Perencanaan Pembangunan Daerah			3.845.217.1		4.095.291.1		13.598.859.9		19.785.616.767		30.674.733.7		3.424.264.37		3.461.131.995		12.516.389.454		11.465.948.035		23.882.840.181
	Penyusunan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009-2013		100	938.6									97,03	910.720.4								
	Penyusunan rancangan RKPD		100	346.45	100	400	100	415	100	650	100	700	78,37	271.513.9	84,70	338.795.5	97,15	404.762.04	89,84	583.944.09	89,57	626.978.718
	Penyelenggaraan musrenbang RKPD		100	662.184.7	100	700	100	850	100	895	100	925	92,59	613.119.285	93,84	653.372.72	93,68	796.240.222	91,35	817.600.1	92,25	853.310.3
	Penyusunan Kebijakan Umum APBD(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)		100	531.949.7	100	640.291.1	100	765	100	790	100	850	90,25	480.068.385	93,97	601.670.35	94,46	722.643.808	90,27	713.097.873	82,16	698.350.8
	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah			539.349.25		650		868.86		943.86		950		444.656.5		592.069.425		699.604.824		733.612.78		773.586.95
	Penyediaan Buku Agenda Bappeda		100	149.983.45			100	175	100	250			97,70	146.532.2			86,64	151.627.5	88,02	220.047.2		
	Evaluasi Program Sharing Budget Tahun 2008-2009 dan Koordinasi Perencanaan Program Sharing Budget Tahun 2011				100	350									85,56	299.45						
	Koordinasi Sinkronisasi dan Konsultasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan				100	200			100	180.88	100	640						89,69	162.228.2	91,31	584.369.9	
	Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sumber Daya Aparatur				100	300	100	425	100	450	100	750			90,22	270.65	95,65	406.507.9	72,61	326.725.	77,04	577.775.978



	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja & Penja (Penetapan Kinerja)		100	85.3	100	100	100	100				99,15	84.575	82,38	82.375	99,35	99.35				
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan APBD		100	500								78,95	394.728.7								
	Koordinasi & Penyusunan Laporan Kinerja, Penja (Penetapan Kinerja) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT)							100	160	100	175							95,16	152.252.2	93,15	163.007
	Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Riau Tahun 2009-2013				100	80								86,72	69.375						
	Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah				100	675	100	550	100	540				81,98	553.374	92,52	508.870.4	89,65	484.127.9		
	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Perbatasan						100	300	100	325	100	750				97,88	293.63	63,47	206.278.1	75,98	569.867.66
	Penyusunan Kebijakan Penataan Asset Milik Pemerintah dalam rangka Peningkatan Perencanaan dan Pengelolaan Asset Milik Pemerintah Provinsi Riau								100	440.382.167								45,97	202.430.367		
	Koordinasi Penataan Pembangunan Pedesaan Wilayah Provinsi Riau								100	450	100	500						32,97	148.349.1	98,74	444.339.7
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup						100	600	100	550	100	1.100.000				97,96	587.773.4	89,01	489.529.325	88,51	973.632.3
	Penyelesaian RTRW Provinsi Riau								100	2.700.000								48,50	1.309.463.4		
	Penyusunan Daya Tampung dan Daya Dukung Lingkungan Provinsi Riau								100	400	100	2.000.000						6,43	25.7	82,57	1.649.920.05



Penyiapan Materi/Paparan/Makalah Pimpinan Terkait Perencanaan Pembangunan di Prov. Riau						100	350	100	250	100	250					99,49	348.210.7	92,86	232.159.325	99,51	248.770.74
Analisa Perilaku Ekonomi Provinsi Riau								100	34.084.6									98,94	33.721.6		
Sinkronisasi RKPD dan KUA/PPAS Kabupaten/Kota								100	400	100	581.39							21,10	84.418.575	90,07	523.633.8
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD								100	250									90,86	227.117.85		
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah di Provinsi Riau								100	550.25	100	500							95,88	527.567.4	89,77	448.873.4
Penyusunan Master Plan Air Minum Regional Inhil, Inhu dan Kuansing								100	2.500.000									95,21	2.380.260.6		
Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Riau 2009-2013								100	150									91,92	137.879		
Masterplan Air Minum Regional Kab. Bengkalis, Kab. Rokan Hilir, Kab. Rokan Hulu dan Kota Dumai								100	2.000.000	100	2.500.000								-	68,72	1.718.117.45
Penyusunan Master plan Drainase Kota Pekanbaru								100	2.000.000										-		
Koordinasi Implementasi Perubahan RPJMD Provinsi Riau								100	426.16									98,40	419.322.8		
Rapat Kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (RAKER BKPRD)								100	500									33,16	165.783.45		
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca								100	1.000.000									68,23	682.331.1		
Evaluasi Capaian Sasaran dan Target RPJMD Prov. Riau 2009 – 2013						100	650									84,11	546.698.065				
Koordinasi, Sinkronisasi Program Penelitian Prioritas Prov. Riau						100	200									93,57	187.132.2				
Penyusunan Indikator Penetapan Pagu Prioritas Pembangunan Prov. Riau						100	100									99,65	99.652				



Evaluasi Efektifitas Sharing Program Antar Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kab/Kota Se-Prov. Riau Tahun 2010 dan Strategi Perencanaan Sharing Program Tahun 2012					100	275									87,12	239.575.5				
Evaluasi/Monitoring Penetapan Kinerja(Penja) SKPD Prov. Riau		100	91.4		100	200					85,72	78.35			90,40	180.798.945				
Penetapan Nilai SPM (Standar Pelayanan Minimum) Jalan Prov. Riau					100	750									93,45	700.893				
Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan					100	1.000.000									94,55	945.549.2				
Penetapan Urutan Daerah Dalam Pembiayaan Penanganan Jalan Kabupaten/Kota di Wilayah Prov. Riau					100	1.200.000									97,00	1.164.015				
Kajian Dampak Daerah Pemekaran Dalam Kaitannya dengan Kebijakan Pembangunan di Prov. Riau					100	1.000.000									96,92	969.247.6				
Penyelesaian Pembahasan dan Pengesahan Ranperda RTRW Prov. Riau					100	2.750.000									86,86	2.388.757.25				
Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Musrenbang					100	74.999.9									99,90	74.849.9				
Penyusunan Rancangan RPJMD									100	650								98,61	640.966.2	
Penyusunan Prioritas dan Pagu Anggaran 2014									100	150								92,74	139.106.55	
Peningkatan Kerjasama Fasilitas dan Fungsi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu									100	1.100.000								50,72	557.882.2	
Sosialisasi RTRW Provinsi Riau 2010 -2030									100	1.450.000								51,80	751.048.3	



Penyusunan Master Plan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Kota Pekanbaru, Kab. Kampar, Kab. Pelalawan, Kab. Siak										100	2.500.000								85,60	2.140.054.9
Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah										100	1.150.170								89,65	1.031.154.395
Perencanaan Strategis Teknologi Informasi Bappeda Provinsi Riau										100	350								51,48	181.444
Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah(EKPD) Provinsi Riau										100	500								93,64	468.186.5
Pengendalian dan Koordinasi Pelaksanaan Program Bidang Perumahan dan Pemukiman										100	300								72,70	218.111.9
Studi Kelayakan Pembangunan Jembatan Bangsal Aceh (Kota Dumai) Darul Aman(Kab. Bengkalis)										100	500								96,15	480.746.6
Koordinasi Implementasi Program Corporate Sosial Responsibility (CSR) Dunia Usaha Provinsi Riau										100	434								61,73	267.924.15
Bimbingan Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010										100	500								69,35	346.598.6
Studi Kelayakan Pembangunan Jembatan Buton (Kab. Siak)- Lukit (Kab. Kep. Meranti)										100	500								87,55	437.764.9
Study Kelayakan Jalan Bebas Hambatan / Jalan Tol Rengat - Tembilahan - Kuala Enok										100	1.200.000								92,06	1.104.764.3



Study Kelayakan Jaringan Transportasi Kereta Api Provinsi Riau										100	2.000.000									64,89	1.297.811.65
Study dan Seminar Pengembangan Sumber Pembiayaan Pembangunan Alternatif Melalui Publik Private Partnership										100	80.313.7									100	80.313.7
Optimalisasi Peran Pelayanan Terpadu dalam Menunjang Birokrasi Daerah di kabupaten / Kota Provinsi Riau										100	550									94,90	521.973.
Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) Kab / Kota se Provinsi Riau										100	500									60,18	300.895.2
Pengendalian Pelaporan Inpres No. 3 Tahun 2010 di Provinsi Riau										100	283.86										267.908.7
Seminar Pengembangan Sumber Pembiayaan Pembangunan Alternatif melalui Public Private Partnership										100	485									55,24	323.333.44
Study Pendahuluan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau										100	570									95,42	543.867.5
Survey Pembiayaan Kegiatan Sektor Pendidikan dalam Percepatan Peningkatan Mutu, Pemerataan dan Peningkatan Kinerja Ekonomi Masyarakat di 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau										100	650									97,16	631.542
Penyusunan Rancangan Renstra Bappeda Provinsi Riau										100	50									91,92	45.961.8
Koordinasi Peningkatan Pengelolaan Asset Milik Pemerintah Provinsi Riau										100	450									55,32	248.944.15
Masterplan Persampahan Kota Pekanbaru (Swakelola)										100	600										-



	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi			572.887.15		2.550.000		1.075.000		3.236.504.2		6.875.000		209.980.95		2.085.915.664		929.176.5		2.529.346.9		5.372.950.15
	Penyusunan RAD PPDT Provinsi Riau		100	572.887.15								36,65	209.980.95									
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan SDA				100	300	100	400	100	550	100	800			99,15	297.464	81,05	324.209.6	86,07	473.373.7	69,94	559.534.9
	Peningkatan Pelaksanaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Prov. Riau										100	400								69,95	279.780.8	
	Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Riau								100	350								58,22	203.764.725			
	Kajian Strategi Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Riau								100	275								85,44	234.953.7			
	Percepatan Pembangunan Klaster Industri Berbasis Pertanian dan Oleokimia IHKS di Provinsi Riau								100	250	100	300						73,20	183.011.575	50,47	152.227	
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Koridor Ekonomi Provinsi Riau								100	400								72,79	291.177.775			
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Riau								100	486.504.2	100	300						79,32	385.908.125	57,60	172.786.275	
	Masterplan Gerakan Riau Menanam Buah								100	625								74,04	462.720.425			
	Model Penanggulangan Kemiskinan Masyarakat Nelayan di Kabupaten Bengkalis dan Kab. Indragiri Hilir								100	300								98,15	294.436.875			
	Penyusunan RAD dan STRADA PDT Provinsi Riau				100	250								93,00	232.500.264							
	Konsultasi Manajemen OPRM				100	1.000.000								68,47	684.726							
	Penyusunan Model Pembangunan Pertanian Terpadu				100	300								67,08	201.225.4							



	FS Klaster Industri Hilir Dumai				100	350								95,71	335						
	FS Klaster Industri Hilir Kuala Enok				100	350								95,71	335						
	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Pendidikan Non Formal di Provinsi Riau						100	675									604.966,9				
	Analisis Kontribusi Perusahaan Kelapa Sawit Terhadap Perekonomian di Provinsi Riau									100	400									90,45	361.791,85
	Masterplan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan									100	500									83,27	416.345,7
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Riau									100	400									74,61	298.449,8
	Studi Kelayakan Pengelolaan Jalan Transportasi ke kawasan IHKS Kuala Enok dari Aspek Keuangan									100	250									74,38	185.956,65
	Perencanaan Pengembangan Ekonomi Sektor Pertanian melalui Peningkatan Peran Tata Niaga Komoditas Beras Kab / Kota									100	950									82,18	780.709,9
	Studi Analisis Perencanaan dan Tata Kelola Pembiayaan Pembangunan dalam Percepatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Provinsi Riau									100	875									85,46	747.764,4
	Masterplan Pembangunan Ekonomi Prov. Riau									100	900									77,70	795.974,875
	Studi Evaluasi Program Strategis di Lingkup Bidang Ekonomi dan SDA									100	800									77,70	621.628



	Program Perencanaan Sosial Budaya			991.6		4.784.432.		1.325.000		2.645.000		3.439.170		863.520.75		4.064.376.94		1.099.934.05		1.579.965.375		2.740.787.192
	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya		100	193	100	300	100	475	100	450	100	592.5	89,02	171.815.5	72,74	218.227.4	86,97	413.111.15	79,76	358.903.6	69,12	409.551.600,00
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi		100	205									82,36	168.840.2								
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup		100	128.15									79,34	101.669.2								
	Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Riau		100	150									87,82	131.725								
	Pengendalian Pelaksanaan Pengembangan Jaringan IT Pemerintah Provinsi Riau								100	250									91,82	229.584.1		
	Sosialisasi Tujuan dan Target Program MDG's								100	350									91,95	321.826.4		
	Penyusunan Rencana Aksi Daerah(RANDA) Pengarusutamaan Gender(PUG) di Provinsi Riau								100	225									87,47	196.799.9		
	Koordinasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)								100	380										365.078.3		
	Studi Kelayakan Pembuatan TV Komunitas dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Riau								100	750										-		
	Penyempurnaan RTRW Provinsi Riau Tahun 2007-2026 Implikasi Terbitnya UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang				100	3.234.432									84,38	2.729.206						



	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup				100	500								96,91	484.571							
	Pengendalian Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) di Provinsi Riau				100	150	100	200			100	300		91,27	136.9	77,66	155.325.5			80,40	241.189.62	
	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Destinasi Unggulan Pariwisata di Provinsi Riau				100	150								73,63	110.443.29							
	Rencana Tindak Lanjut Rencana		100	315.45			100	150	100	240			91,76	289.470.85			93,30	139.95	44,91	107.773.075		
	Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi(RAD-PK) Provinsi Riau				100	250								91,60	229							
	Studi Evaluasi Pelaksanaan Guru Bantu se-Propinsi Riau				100	200								78,01	156.029.25							
	Sosialisasi Rencana Aksi Nasional(RAN) Kepemudaan						100	150									98,02	144.036.2				
	Penyusunan RAD MDG's Provinsi Riau						100	350									70,72	247.511.2				
	Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan dan Target Program MDGs										100	650								75,09	488.098.65	
	Koordinasi Percepatan Program Keluarga Harapan (PKH)										100	400								61,08	244.335.9	
	Penyusunan, Fasilitasi, Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RADPK) Provinsi Riau dan Kab / Kota										100	446.92								80,75	360.899.822	
	Penyusunan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Riau										100	400								92,05	368.216.6	
	Kick Off Meeting Program Keluarga Berencana dalam mendukung Pencapaian Tujuan dan Target MDGs 2015 di Provinsi Riau											336								97,39	327.245	
	Sosialisasi Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender (PUG) di Provinsi Riau										100	313.75								96,02	301.25	



	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam			845.35		648.275		425		530				568.770.6		625.147		378.260.75		497.032.9		
	Program Pengelolaan Sumber Daya Alam Pesisir dan Kelautan (MCRMP) Riau (LOAN ADB SF-1170) Pendamping dan Penunjang Koordinasi Pengelolaan SDA		100	402.1									54,05	217.324								
	Penguatan Pusat Data Spasial Provinsi Riau Penunjang Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut							100	180	100	200					235.147			94,31	169.754.9	81,76	163.511.9
	Penyusunan Neraca Sumber Daya Alam		100	443.25				100	350	100	750	79,29	351.446.6			390			93,51	327.278	86,50	684.730.4
	Operasional Pusat Data Spasial Provinsi Riau Penunjang Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut				100	248.275	100	175									80,98	141.720.9				
	Identifikasi Potensi Kawasan Mangrove dan Analisis Pemanfaatan Sumber Energi Alternatif dan Nipah				100	400																
	Penyusunan Neraca Kelautan dan Sumber Daya Pesisir Prov. Riau						100	250									94,62	236.539.85				
	Strategi Pengembangan Perkebunan Rakyat di Provinsi Riau									100	400										91,04	364.146.05
	Penyusunan Kemampuan daya Dukung Lahan Terhadap Perkebunan Kelapa Sawit di Prov. Riau									100	300										94,35	283.053

Sumber : Bidang Statistik, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Provinsi Riau Tahun 2013



2.3.3 Kinerja Pelayanan Bappeda periode 2014-2019

Dalam pelaksanaan kinerja dan pelayanan Bappeda Provinsi Riau, maka perlu dilihat dari indikator yang terukur. Indikator tersebut harus dapat menjadi indikator utama dalam pengukuran suatu organisasi dalam hal ini Bappeda Provinsi Riau. Adapun kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Riau sebagaimana tercantum dalam Renstra Bappeda Tahun 2014-2019 adalah (1) persentase dokumen perencanaan berkualitas dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan, (2) Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi, (3) Jumlah kebijakan/ rekomendasi kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan serta (4) jumlah data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem *on line*/elektronik.

Melihat dari urgensi indikator kinerja pelayanan yang ada sebagaimana dimaksud dan dihubungkan dengan ketercapaian indikator tersebut, maka untuk indikator Jumlah kebijakan/ rekomendasi kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan mempunyai keterhubungan terhadap pencapaian tujuan indikator persentase dokumen perencanaan berkualitas dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan serta indikator tersebut disederhanakan nomenklaturnya menjadi persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, kinerja pelayanan Bappeda untuk Perubahan Renstra Bappeda Tahun 2014 – 2019 adalah (1) Persentase peningkatan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah, (2) Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi, (3) jumlah data sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan.

Adapun penjelasan terhadap indikator kinerja pelayanan Bappeda sebagai berikut :



1) *Persentase peningkatan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah*

Fungsi dan peran BAPPEDA sebagai lembaga teknis daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan. Kewenangan perencanaan dan pengendalian tersebut telah diatur didalam peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan pada alinea terdahulu. Dalam menjalankan fungsi dan peran sebagaimana tersebut, tentunya produk yang dihasilkan adalah bagaimana terwujudnya rencana pembangunan daerah berkualitas yang dapat mencapai visi dan misi daerah baik di dalam RPJPD maupun RPJMD. Luasnya pemahaman mengenai perencanaan berkualitas menjadi kendala dalam mengukur indikator perencanaan yang berkualitas. Dalam hal pencapaian jangka menengah, pengukuran perencanaan berkualitas dapat diukur melalui ketercapaian indikator kinerja daerah (IKD) yang tercantum di dalam RPJMD. Namun banyaknya kewenangan SKPD lainnya di dalam pencapaian IKD maka akan sulit mengukur ketercapaian dari kinerja Bappeda itu sendiri.

Sinkronisasi antar dokumen perencanaan merupakan suatu keharusan agar tercapainya tujuan dan sasaran baik didalam ketercapaian RPJMD maupun Renstra maupun program tahunan. Sinkronisasi antar dokumen perencanaan merupakan tugas yang ada pada Bappeda Provinsi Riau sehingga ketercapaian visi dan misi baik pada RPJMD maupun Renstra SKPD dapat tercapai. Oleh karena itu, sinkronnya antar dokumen perencanaan dapat menjadi indikator tercapainya perencanaan yang berkualitas. Tentunya dokumen perencanaan yang dapat menjadi acuan terhadap perencanaan yang berkualitas adalah dokumen perencanaan yang saling berhubungan langsung terhadap capaian masing-masing dokumen seperti RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Mencermati keterhubungan masing-masing dokumen, maka indikator Persentase dokumen perencanaan berkualitas dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan dapat dilihat melalui *persentase kesesuaian PPAS dengan RKPD, Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD dan Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD.*



2) Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi

Demi mewujudkan dokumen perencanaan yang berkualitas tentunya harus didukung oleh aparatur perencana yang memiliki kompetensi dan kemampuan dibidang perencanaan. Pemerintah Provinsi Riau masih sedikit memiliki aparatur perencana yang memiliki kemampuan dalam bidang perencana. Tentunya kemampuan di bidang perencanaan dapat diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan tentang perencanaan.

Kebutuhan akan aparatur perencana selain dibutuhkan pada Bappeda Provinsi Riau, juga dibutuhkan oleh Perangkat Daerah lainnya sebagai perencanaan pada Perangkat Daerah dimaksud. Minimal untuk masing-masing Perangkat Daerah pada sub bagian perencanaan program harus memiliki 1 orang staf yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang perencanaan serta 1 orang fungsional perencana. Berikut ditampilkan jumlah kebutuhan aparatur perencana pada Pemerintah Provinsi Riau dengan menggunakan SOTK tahun 2013 :

Tabel 2.8
Jumlah Kebutuhan Aparatur Perencana
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau*

NO	KETERANGAN	JUMLAH			TOTAL
		PEJABAT STRUKTURAL	FUNGSIONAL PERENCANA	STAF	
1	Sekretariat Daerah : 9 Biro	9 (kasubbag TU)	9	9	18
2	Bappeda	23	12	117	152
3	SKPD Lainnya	41 (Kasubbag Perencanaan Program)	41	41	123
TOTAL		73	57	172	293

*data tahun 2014.

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa jumlah aparatur perencana yang harus memiliki kompetensi di bidang perencanaan adalah berjumlah 293 orang. Kebutuhan riil yang dibutuhkan terhadap aparatur yang mempunyai kompetensi di bidang perencanaan adalah berjumlah 220 orang mengingat 73 pejabat



struktural karena jabatannya dianggap sudah mampu di bidang perencanaan. Sedangkan pada Bappeda Provinsi Riau, idealnya seluruh staf yang berjumlah 117 orang harus memiliki kompetensi di bidang perencanaan. Sedangkan masing-masing bidang pada Bappeda Provinsi Riau harus memiliki setidaknya 2 orang fungsional perencana untuk mendukung kinerja Bappeda Provinsi Riau agar lebih optimal.

Bappeda Provinsi Riau selaku Pembina aparatur perencana telah melakukan beberapa kegiatan demi peningkatan kapasitas aparatur perencana dengan melakukan diklat dan bimtek di bidang perencanaan serta pengiriman aparatur untuk peningkatan pengetahuan perencana. Berikut ditampilkan aparatur yang telah memiliki sertifikat perencana dasar maupun sertifikasi fungsional perencana.

Tabel 2.9
Data Aparatur Pemprov Riau yang Telah Memiliki Sertifikat Perencana Melalui Diklat Teknis dan Fungsional Perencana s/d Tahun 2016

NO.	Pelaksanaan Diklat	JUMLAH
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah	245
2.	Fungsional Perencana	
	- Fungsional Madya	7
	- Fungsional Muda	33
	- Fungsional Pertama	38
JUMLAH		323

Sumber Data: Data Bidang Sumber Daya Aparatur Bappeda Provinsi Riau

Dapat dilihat dari diatas bahwa aparatur Pemerintah Provinsi Riau yang telah memiliki sertifikat perencana dasar maupun sertifikasi fungsional perencana sampai dengan tahun 2016 berjumlah 323 orang, dari jumlah tersebut 35 orang merupakan pejabat fungsional perencana di lingkup pemerintah Provinsi Riau.

Mulai tahun 2016 terjadi pemindahan penyelenggara kegiatan diklat fungsional perencana dari Bappeda ke BKP2D (Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah) dikarenakan penyesuaian dengan tugas pokok dan fungsi SKPD tersebut. Pemindahan tanggungjawab dan Perubahan SOTK sesuai Perda



Tahun 4 Tahun 2016 berdampak pada perubahan perhitungan kebutuhan jumlah aparatur berkualitas lingkup Bappeda Provinsi Riau. Idealnya staf Bappeda Provinsi Riau yang berjumlah 124 orang harus memiliki kompetensi di bidang perencanaan. Masing-masing bidang pada Bappeda Provinsi Riau harus memiliki setidaknya 3 orang fungsional perencana sedangkan Sekretariat dan UPT Data dan Analisis Perencanaan Pembangunan setidaknya masing-masing memiliki 1 fungsional perencana untuk mendukung kinerja Bappeda Provinsi Riau agar lebih optimal. Berikut perubahan perhitungan aparatur yang mempunyai kompetensi dari aparatur perencana Bappeda Provinsi Riau berdasarkan SOTK Tahun 2016:

Tabel 2.10
Analisis Kebutuhan Aparatur Perencana yang memiliki kompetensi di Bidang Perencanaan di Bappeda Provinsi Riau (Per Desember 2016)

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Pejabat Struktural	22
2	Fungsional Perencana	15
3	Staf	124
	TOTAL	161

Tabel 2.11
Jumlah Aparatur Di Bappeda Provinsi Riau yang telah memiliki Sertifikat Perencanaan Dasar maupun Sertifikat Fungsional Perencana s/d Tahun 2016

NO	PELAKSANAAN DIKLAT	JUMLAH	KET
1	Perencanaan Pembangunan Daerah	41 orang	
2	Fungsional Perencana	15 orang	
3	Diklat perencanaan lainnya	11 orang	
	TOTAL	67 orang	

Yang termasuk diklat perencanaan lainnya adalah pelatihan instruktur perencanaan pembangunan sumber daya manusia, Perencanaan pembangunan berwawasan gender, PPN, training program perencanaan pariwisata daerah, Bimtek nasional perencanaan pembangunan nasional dan daerah, Diklat perencana dan kebijakan pengelolaan potensi daerah, *ToT for public private partnership*, Diklat *green economy* bappenas, Diklat basis data spasial dan kajian



wilayah, Bimtek nasional perencanaan darah dan monitoring evaluasi pembangunan, Bimtek sistem informasi manajemen perencanaan anggaran (simren). Dapat dilihat dari tabel 2.11 bahwa aparatur Bappeda Provinsi Riau yang telah memiliki sertifikat perencanaan berjumlah 67 orang ditambah pejabat struktural yang telah dianggap memenuhi kompetensi dibidang perencanaan sebanyak 25 orang sehingga totalnya menjadi 92 orang. Dari kebutuhan yang telah disebutkan diatas, tentunya aparatur Bappeda Provinsi Riau masih kekurangan 70 orang aparatur perencana yang memiliki kompetensi di bidang perencanaan. Sedangkan untuk Fungsional perencana Bappeda telah memenuhi standar kebutuhan.

3) Jumlah data sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan

Pada indikator selanjutnya, selain rekomendasi kebijakan tentunya ketersediaan data dan informasi menjadi salah satu faktor penting di dalam penyusunan perencanaan. Ketersediaan data yang akurat akan memudahkan menghitung perencanaan yang matang terhadap apa yang diinginkan pada periode selanjutnya, oleh karena itu jumlah data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan dapat menjadi indikator pelaksanaan kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Riau selanjutnya.

Tabel 2.12
Ketersediaan Data Dasar pada Bappeda Provinsi Riau

NO	JENIS DATA
1	Data dan Informasi Pembangunan Provinsi Riau
2	Sistem Informasi Pembangunan Daerah
3	Simpul Jaringan Geospasial Provinsi Riau

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Riau



2.4. Tantangan dan Peluang Pelayanan BAPPEDA Provinsi Riau

Dari hasil analisis terhadap Renstra Kementerian PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Riau pada lima tahun mendatang (hasil analisis terlampir), Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan BAPPEDA Provinsi Riau yaitu :

1. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan pembangunan daerah
2. Sharing data dan informasi belum berjalan dengan baik karena pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal;
3. Meningkatkan ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan;
4. Ego sektoral dari instansi terkait di luar lingkup Bappeda terutama urusan yang bersifat concurrent;
5. Kemampuan pembiayaan pemerintah pusat serta pendapatan asli daerah yang masih belum optimal;
6. Peningkatan kapasitas aparatur perencana;
7. Arus globalisasi yang dapat berdampak negatif pada perencanaan pembangunan daerah.

Sementara untuk peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan BAPPEDA Provinsi Riau yaitu :

1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD Provinsi terhadap BAPPEDA dalam melaksanakan pembangunan daerah;
2. Kebijakan otonomi daerah ;
3. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri;
4. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur seperti e-planning, e-monev, e-proc dan sebagainya;
5. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel.



ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda Provinsi Riau

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan lembaga perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, ketenagakerjaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, penelitian, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mekanisme perencanaan pembangunan daerah ke depan dituntut untuk semakin mengedepankan pendekatan perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel. Berdasarkan analisis dan *lesson learned* yang diperoleh dari perencanaan pembangunan Riau, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Terbatasnya kualitas sumber daya manusia serta penempatannya yang belum sesuai dengan bidang keahlian;
2. Terbatasnya data yang valid dan berkualitas;
3. Rendahnya penggunaan dokumen rencana tata ruang dalam perumusan perencanaan kewilayahan (spasial);
4. Kurangnya koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan program



- pembangunan tahunan sehingga tidak tepat waktu;
5. Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan dan monev secara elektronik (e-planning dan e-monev);
 6. Masih kurangnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan.

Bappeda Provinsi Riau memiliki 159 orang pegawai yang terdiri dari 21 orang pejabat struktural, 123 orang staf dan 15 orang memiliki tenaga fungsional perencana. Komposisi pegawai tersebut telah sesuai dengan beban kerja namun, dalam hal penempatan pegawai masih belum sesuai dengan kebutuhan bidang keahliannya yang memerlukan ketepatan metoda analisis, ketepatan waktu, tepat sasaran dan tepat dari sisi anggaran. Demikian juga dari ketersediaan peralatan pendukung dan pengelolaan aset masih sangat terbatas sehingga dapat menghambat kinerja sesuai dengan harapan.

Berdasarkan kondisi obyektif yang dipaparkan di atas, kapasitas Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan di Provinsi Riau perlu diperkuat agar dapat memastikan berjalannya proses perencanaan pembangunan secara baik. Faktor pendorong dan penghambat secara internal kelembagaan Bappeda yang terkait dengan tujuan jangka menengah Bappeda Riau dapat dilihat pada Tabel 3.1.



Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor yang Mempengaruhi	
	Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)
Terbatasnya kualitas sumber daya manusia	Penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kompetensi	• Tingginya motivasi pegawai dalam melaksanakan tugas • Pemberian penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja
Terbatasnya peralatan pendukung yang tersedia	Belum tertatanya sistem pengelolaan aset dengan baik	Memanfaatkan sarana dan prasarana secara optimal
Kurangnya koordinasi dengan stakeholders dalam penyusunan program pembangunan tahunan sehingga tidak tepat waktu	Belum optimalnya peran aktif dari SKPD terhadap perencanaan	Adanya komitmen bersama dalam mewujudkan program pembangunan Riau yang lebih baik
Belum optimalnya pelaksanaan perencanaan secara e-planning	Aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan baik	Keterbukaan informasi dan komunikasi
Belum sinergisnya perencanaan sesuai dengan potensi daerah	• Pemanfaatan sumber daya alam yang masih belum tepat guna • Masih kurangnya aparatur di bidang penelitian	• Teridentifikasi potensi unggulan daerah yang sangat memadai • Terpetakan potensi pengembangan kewilayahan
Belum optimalnya peran pengendalian, monitoring dan evaluasi pembangunan	• Jadwal perencanaan tidak tepat waktu • Hasil Monitoring dan Evaluasi belum dijadikan pedoman dalam perencanaan yang akan datang	Ketersedianya media komunikasi elektronik yang dapat diakses kapan saja
Terbatasnya data yang valid dan berkualitas	Koordinasi dengan stakeholders di bidang data masih kurang	Adanya keinginan bersama antar SKPD dan pihak terkait dalam penyeragaman data

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Hasil identifikasi Bappeda Provinsi Riau tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappeda Provinsi Riau yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Bappeda Provinsi Riau. Dengan



demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau 2005-2025, maka Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau 2005-2025 adalah :

“Terwujudnya Provinsi Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun 2020”.

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau di atas, maka Kepala Daerah menyusun visi pembangunan jangka menengah lima tahunan kedua yang ditetapkan sebagai Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2014–2019 yaitu:

“Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”.

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan kedepan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 9 (sembilan) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2014 - 2019, sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur;
2. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan;
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan;
4. Menurunkan Kemiskinan;
5. Mewujudkan Pemerintahan yang Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik;
6. Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertakwa;
7. Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan;



8. Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Pariwisata;
9. Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan.

Memperhatikan visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Riau, dapat dilihat bahwa BAPPEDA memiliki peran dan tugas penting dalam mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut. Selanjutnya terhadap visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dianalisis faktor pendorong dan penghambat pelayanan Bappeda Provinsi Riau terhadap pencapaian visi dan misi tersebut seperti pada tabel berikut ini :



Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappeda Provinsi Riau
Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program
Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau Tahun 2014-2019

Misi dan Program Gubernur	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur; 2. Meningkatkan pelayanan pendidikan; 3. Meningkatkan pelayanan kesehatan; 4. Menurunkan Kemiskinan 5. Mewujudkan Pemerintahan Handal dan Terpercaya serta Pemantapan Kehidupan Politik; 6. Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa; 7. Memperkuat pembangunan pertanian dan perkebunan; 8. Meningkatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pariwisata; 9. Meningkatkan peran swasta dalam pembangunan.	1. Belum terukur/tercapainya tujuan, target, dan sasaran pembangunan Provinsi Riau; 2. Belum optimalnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, baik di tingkat pusat, Provinsi dan Kab/Kota dalam menyusun dokumen rencana daerah; 3. Belum maksimalnya Keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 4. Belum Konsisten dan terkatnya antara pencapaian tujuan Provinsi Riau dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD baik di tingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota.	• Terdapatnya kewenangan penanganan urusan pemerintahan yang tumpang tindih; • Persoalan pembangunan <i>cross cutting issue</i> belum tertangani secara jelas; • Dokumen rencana pembangunan Daerah belum diacu secara konsisten.	• Beberapa peraturan perundang-undangan mengamanatkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional melalui perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah; • penghargaan dan hukuman berdasarkan kinerja; • Kuantitas SDM aparatur tingkat Provinsi dan Kab/Kota cukup memadai.

Sumber : Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dan Hasil Analisis Perubahan Renstra Bappeda Provinsi Riau Tahun 2014-2019

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Sesuai pedoman yang diatur dalam Permendagri No. 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa penyusunan Renstra SKPD perlu memperhatikan Renstra Kementerian dan Lembaga. Untuk itu renstra Bappeda perlu melakukan sinkronisasi dengan Renstra Kementerian PPN/Bappenas.



Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas menetapkan dua tujuan utama Kementerian PPN/Bappenas yaitu: (1) Terwujudnya rencana pembangunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas, dan (2) terlaksananya penugasan-penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan kebijakan pembangunan nasional. Kedua tujuan tersebut dicapai melalui empat kegiatan utama yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi; dan didukung dengan empat faktor utama yaitu (1) pengelolaan anggaran, (2) sumber daya manusia, (3) organisasi, dan (4) sarana dan prasarana kerja. Beberapa sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas yaitu:

1. Sasaran Strategis dari Tujuan Pertama: “Terwujudnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Tahunan (RPJMN dan RKP) yang berkualitas”, adalah:
 - Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
 - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN;
 - Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua: “Terlaksananya Penugasan lainnya dari Presiden/Pemerintah dalam kaitan dengan kebijakan Pembangunan Nasional” adalah: persentase tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas (penugasan khusus) dari Pemerintah/Presiden.

Sasaran dalam Renstra Bappeda juga memiliki tujuan untuk pencapaian visi misi pembangunan nasional yang dijabarkan dalam sasaran Renstra Bappenas. Beberapa faktor penghambat dan pendorong dari sisi pelayanan Bappeda dijelaskan dalam Tabel 3.3 berikut ini:



Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan berdasarkan Sasaran Renstra K/L
dan Renstra SKPD Kabupaten/Kota

Sasaran Renstra Bappenas	Permasalahan Pelayanan Bappeda Riau dan Bappeda Kabupaten/Kota	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Tercapainya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar ruang, Antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; 2. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RPJMN; 3. Meningkatnya kepercayaan pemangku kepentingan (stakeholders) terhadap RKP.	1. Dokumen Perencanaan RPJP, RPJM, Renstra K/L dan RKP belum dijadikan sebagai dasar perencanaan pengembangan antar daerah; 2. Penyusunan RPJMN belum mengakomodasi aspirasi/kebutuhan Provinsi Riau;	1. Terbatasnya SDM yang berkompeten dalam penyusunan dokumen perencanaan; 2. Kurangnya koordinasi antara pusat dan daerah pada saat Penyusunan Prioritas Nasional; 3. Program/kegiatan yang ada dalam RKP tidak dapat menampung aspirasi Daerah.	- Akuntabilitas kinerja Pemerintah dapat diukur dengan baik dan sesuai dengan rencana; - Program/kegiatan yang diusulkan di sesuaikan dengan kewenangan masing-masing; - Potensi SDA Riau sangat mendukung dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi regional.

Sumber : Renstra Kemen PPN/Bappenas dan Renstra Bappeda Kab/Kota

Sasaran strategis Kementerian PPN/Bappenas tersebut perlu mendapat dukungan dari daerah untuk dapat mencapai tujuan nasional yang diharapkan. Demikian juga dengan Renstra Bappeda Provinsi Riau harus memiliki tujuan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Evaluasi RPJMD Provinsi Riau

Provinsi Riau pertama kali menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) pada Tahun 1991 dan disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Riau melalui Perda Nomor 10 Tahun 1994, dengan masa berlaku selama 15 tahun yakni tahun 1994 hingga tahun 2009. Dengan terbitnya Undang-Undang Penataan Ruang dan adanya pemekaran Provinsi Riau dengan Provinsi Kepulauan Riau menyebabkan terjadinya perubahan pola dan struktur ruang Provinsi Riau, sehingga diperlukan revisi terhadap Perda Tata Ruang tersebut. Meski RTRW Propinsi Riau 1994 - 2009 telah habis masa berlakunya, namun



hingga saat ini Rancangan Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau masih dalam tahap finalisasi oleh DPRD Provinsi Riau untuk ditetapkan menjadi Perda. Meskipun demikian, perencanaan pembangunan wilayah Provinsi Riau telah diselaraskan dengan rancangan RTRW dimaksud dengan aspek struktur dan pola ruang telah mengacu pada RTRW Nasional dan RTR Pulau Sumatera.

Penataan ruang merupakan proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan sekaligus juga merupakan produk yang memiliki landasan hukum untuk mewujudkan tujuan pengembangan wilayah. Melalui instrumen ini pula maka daya dukung lingkungan dari suatu wilayah menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam rangka perwujudan wilayah Provinsi Riau sebagai pusat-pusat kegiatan sesuai dengan fungsi dan skala pelayanan yang diharapkan.

Dalam rancangan RTRW Provinsi Riau 2016-2035, telah dirumuskan rencana sistem perkotaan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp), serta Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Selain itu juga telah diintegrasikannya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Provinsi Riau serta ditetapkan beberapa kawasan strategis nasional, kawasan strategis provinsi, dan kawasan strategis kabupaten/kota yang dalam upaya perwujudannya memerlukan perhatian khusus, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.



Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Riau berdasarkan
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau	Permasalahan Pelayanan Bappeda	Faktor yang Mempengaruhi	
		Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)
Pekanbaru-Dumai diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	-	Ranperda RTRW Provinsi Riau belum ditetapkan.	• Posisi strategis yang berada di tengah pulau Sumatera dan jalur pelayaran internasional Selat Malaka sebagai pusat perdagangan dan industri hasil olahan sektor perkebunan dan kehutanan serta hasil galian minyak bumi dari Kabupaten Bengkalis dan Rokan Hilir.
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) diarahkan pada setiap ibukota Kabupaten, meliputi Bangkinang, Pasir Pangairan, Bagan Siapi-api, Pangkalan Kerinci, Teluk Kuantan, Bengkalis, Siak Sri Indrapura, Rengat, dan Tembilahan. Sedangkan Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp) diarahkan pada Selat Panjang, Kuala Enok dan Tanjung Buton.	Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu	Kualitas aparatur perencanaan belum memadai	• Potensi sebagai pusat perdagangan dan jasa, pusat pemerintah kabupaten serta sebagai kawasan pengembangan industri, pariwisata, kehutanan, perkebunan dan pertanian dan pertambangan.
Pusat Kegiatan Lokal (PKL) diarahkan pada Ujung Tanjung; Ujung Batu, Sungai Pakning, Bagan Batu, Duri, Perawang, Air Molek, Sungai Guntung, Sungai Apit, dan Pulau Kijang.	Tidak optimalnya koordinasi antar SKPD/Instansi sehingga kesesuaian rencana dengan implementasi masih rendah.	Hasil pengendalian dan evaluasi penataan ruang kurang berkontribusi sebagai acuan perencanaan.	• Potensi sebagai kawasan pengembangan permukiman, industri perkebunan, pertambangan dan migas, pertanian, perikanan, pariwisata serta pusat perdagangan dan jasa.
Kawasan strategis propinsi, meliputi Kawasan Strategis Duri – Dumai – Rupat, Selat Panjang dan sekitarnya, Kuala Enok, Kawasan Industri Tenayan, Kawasan Industri Tanjung Buton, Kawasan Istana Siak Sri Indrapura dan sekitarnya, Kawasan Candi Muara Takus dan sekitarnya, Kawasan Strategis PLTA Koto Panjang.	Belum optimalnya perencanaan kewilayahan terpadu	Kualitas aparatur perencanaan belum memadai	• Kawasan ini memiliki pengaruh yang sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.

Sumber : Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Bappeda Provinsi Riau

Pelaksanaan KLHS evaluasi RPJMD Provinsi Riau mengacu pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa mewajibkan pemerintah daerah melaksanakan kajian



lingkungan hidup strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup.

Selanjutnya sesuai Pasal 26 Permendagri 67 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah bahwa Pemerintah Provinsi Riau melalui Kelompok Kerja Pengendalian Lingkungan (POKJA PL) telah melakukan Pengkajian terhadap visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, kebijakan umum dan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Selain itu dengan diberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis bahwa sesuai pasal 19 diperlukan Penjaminan kualitas KLHS yang dilaksanakan melalui penilaian mandiri oleh Penyusun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program untuk memastikan bahwa kualitas dan proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal tersebut KLHS Evaluasi RPJMD Provinsi Riau telah dilakukan evaluasi Penjaminan kelayakan KLHS oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Salah satu hal penting dalam upaya pelestarian lingkungan hidup, sebagai mana tertuang dalam UU PPLH, adalah pengembangan instrumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). KLHS pada prinsipnya merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi rencana program jangka menengah daerah (RPJMD) yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Seluruh proses dalam penyusunan dokumen KLHS dilaksanakan secara



partisipatif yang diawali dengan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh instansi daerah dan unsur-unsur seperti tim KLHS LSM, dan Tokoh Masyarakat. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan tahap-tahap berikutnya yang meliputi tahap pelibatan pemangku kepentingan, pelingkupan, pengumpulan dan analisis baseline data, pengkajian pengaruh program, perumusan mitigasi dan alternatif perbaikan program, penyusunan rekomendasi dan pengambilan keputusan.

Tahap pelibatan pemangku kepentingan pada proses penyusunan dokumen KLHS Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti pemerintah, LSM, perguruan tinggi atau akademisi, dunia usaha, dan tokoh masyarakat. Dengan demikian masyarakat ikut berperan aktif dalam proses penerapan KLHS. Berdasarkan hasil proses penyusunan KLHS RPJMD Provinsi Riau yang telah dilakukan agar memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Visi dan Misi agar memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yaitu keterkaitan, keseimbangan, dan keadilan.
2. Arah kebijakan, strategi, dan program agar memperhatikan kajian pengaruh yang berdampak negatif terhadap isu strategis yang muncul untuk Kabupaten Pelalawan.
3. Perlu komitmen dari pemerintah Kabupaten untuk memperhatikan hasil KLHS RPJMD sebagai instrumen yang mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan dan program.
4. Dalam mengimplementasikan KLHS RPJMD sebagai instrumen perlu memperhatikan karakteristik wilayah kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sehingga berhasil guna dan berdaya guna.
5. Karakteristik wilayah yang harus mendapat perhatian adalah terkait dengan isu strategis berupa:
 - a. Menurunnya keanekaragaman hayati dan kinerja layanan jasa ekosistem
 - b. Peningkatan intensitas dan wilayah bencana serta kerentanan terhadap perubahan iklim



- c. Meningkatnya pengangguran, kemiskinan, kesenjangan dan konflik
- d. Kualitas pendidikan serta pelestarian nilai budaya melayu
- e. Kinerja kelembagaan dan tata kelola pemerintahan

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Mengacu pada berbagai peluang dan tantangan yang dihadapi BAPPEDA pada masa yang akan datang dan sasaran RPJMD dan dari hasil nilai skala kriteria terhadap isu strategis (data terlampir), maka isu-isu strategis perencanaan pembangunan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme aparat perencana untuk melaksanakan tugas dan fungsi BAPPEDA sebagai perumus kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
2. Peningkatan pengendalian, monitoring dan evaluasi untuk menghasilkan informasi dan data dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi;
3. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi perencanaan antar bidang, urusan dan lintas sektor untuk menghasilkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas;
4. Optimalisasi kelembagaan perencanaan pembangunan melalui peningkatan kapasitas;
5. Konsistensi antar dokumen perencanaan;
6. Pengembangan sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel dan aksesibel.



VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Visi dan Misi Bappeda Provinsi Riau

4.1.1 Visi Bappeda

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi Riau ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, maka Bappeda sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan pembangunan di daerah untuk mendukung perencanaan nasional, dituntut untuk menghasilkan produk-produk yang berkualitas terutama produk berupa rencana pembangunan. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus memperhatikan visi Gubernur dan dikaitkan dengan Rancangan Akhir RPJMD Riau periode 2014-2019. Melalui penyusunan rencana pembangunan daerah, Bappeda harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD dan RKPD. Hal ini juga berlaku bagi SKPD lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antardaerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga), maupun Provinsi dan Kabupaten Kota (RPJMD/RKPD/Renstra SKPD).



Apabila keseluruhan hal tersebut dapat diimplementasikan maka Bappeda Provinsi Riau telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, Visi dan Misi Perubahan RPJMD 2014-2019. Berdasarkan hasil dari perumusan visi (perumusan terlampir), maka dapat dirumuskan Visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau yaitu :

“Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas melalui Lembaga Perencana yang Profesional dan Berintegritas”

Penjelasan Visi:

Sebagai Satuan Kerja perencanaan yang ditugaskan serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang, maka pengertian kata berkualitas, Profesional dan Berintegritas adalah sebagai berikut:

1. **Berkualitas** adalah tersusunnya rencana pembangunan yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan kebutuhan lokal atau akomodatif terhadap dinamika dan aspirasi masyarakat, mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, dan akomodatif terhadap dinamika perkembangan global.
2. **Profesional** menggambarkan kinerja yang berorientasi pada hasil dan dengan menjaga kaidah-kaidah proses dalam sebuah kerangka organisasi perencanaan yang modern.
3. **Integritas** menunjukkan sebuah sikap yang berpegang teguh pada nilai-nilai yang benar dan teguh sikap yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pelayanan publik.



4.1.2 Misi Bappeda

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dan berdasarkan perumusan misi (perumusan terlampir), dapat dituangkan melalui 3 (tiga) Misi sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Meningkatkan Kompetensi Aparatur Perencana serta Kapasitas Kelembagaan Menuju Lembaga Perencana Yang Profesional;
3. Peningkatan Pengelolaan Data Perencanaan yang Valid serta dapat Dipertanggung Jawabkan Dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi.

Dalam mencapai misi tersebut, maka diperlukan upaya yang optimal dari setiap aparatur BAPPEDA Provinsi Riau untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Provinsi Riau

Berdasarkan misi yang telah diuraikan di atas, maka tujuan jangka menengah yang ingin diwujudkan adalah :

1. Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
2. Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Perencana;
3. Meningkatkan Sistem Pengelolaan Data, Statistik dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah;

Untuk tercapainya tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran jangka menengah dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut ini:



Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2014 - 2016

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke -		
				2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	Persentase kesesuaian PPAS terhadap RKPD	70 %	75 %	80 %
			Persentase kesesuaian RKPD dengan RPJMD	70 %	75 %	80 %
			Persentase kesesuaian Renja SKPD terhadap Renstra SKPD	70 %	75 %	80 %
		Tersedianya kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah kebijakan Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan sebagai pendukung terhadap penyusunan dokumen perencanaan	6 kebijakan perencanaan	6 kebijakan perencanaan	6 kebijakan perencanaan
2.	Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana *	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	218 orang	250 orang	270 orang
3.	Meningkatkan sistem pengelolaan data, statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan yang dapat diakses dengan sistem on line/elektronik.	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	5 data dasar	7 data dasar	9 data dasar

Keterangan :

Tahun 2014-2016, target jumlah aparatur perencana bersertifikat se-Provinsi Riau.

*Tahun 2017-2019, target jumlah aparatur perencana bersertifikat Bappeda Provinsi Riau.



Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan BAPPEDA Tahun 2017 - 2019

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun ke		
				2017*	2018*	2019*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	Persentase peningkatan kualitas dokumen rencana pembangunan daerah	85	87	90
2.	Peningkatan Kualitas dan Kapasitas Kelembagaan dan Aparatur Perencana*	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	30 orang	30 orang	30 orang
3.	Meningkatkan Sistem Pengelolaan Data, Statistik dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	3 data	3 data	3 data

Keterangan :

*Tahun 2017-2019, target jumlah aparatur perencana bersertifikat Bappeda Provinsi Riau.



Dari tabel diatas dapat dilihat indikator-indikator pengukuran capaian sasaran dan tujuan jangka menengah SKPD. Agar lebih memudahkan pelaksanaan evaluasi dan pencapaian indikator tersebut, perlu dijelaskan formulasi perhitungan dari masing-masing indikator. Adapaun formulasi masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini ;

Tabel 4.3
Formulasi dan Perhitungan Indikator

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	FORMULASI PERHITUNGAN INDIKATOR	KET
1.	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	Persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	$A = \frac{\text{kesesuaian RKPd thd RPJMD}}{\sum \text{RKPd}} \times 100\%$ $B = \frac{\text{kesesuaian PPAS thd RKPd}}{\sum \text{PPAS}} \times 100\%$ $C = \frac{\text{kesesuaian Renja thd Renstra}}{\sum \text{RENJA}} \times 100\%$ $\% \text{ Kualitas perencanaan} = \frac{A + B + C}{3}$	
2.	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Jumlah aparatur perencana yang memiliki ijazah atau sertifikat perencana	
3.	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	

4.3 Strategi dan Kebijakan Bappeda Provinsi Riau

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Bappeda dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan Provinsi Riau. Berdasarkan identifikasi peluang dan tantangan sebagaimana diuraikan sebelumnya, selanjutnya akan dituangkan dalam bentuk matriks SWOT.



Tabel 4.4 : Matrik SWOT

Analisis Lingkungan Eksternal Analisis Lingkungan Internal	Peluang (Opportunity - O)	Tantangan (Threat - T)
	1. Dukungan Kepala Daerah dan DPRD provinsi terhadap BAPPEDA dalam melaksanakan pembangunan daerah 2. Kesempatan dan peluang kerjasama dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri 3. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat meningkatkan kinerja aparatur 4. Tuntutan masyarakat terhadap perencanaan pembangunan yang transparan, partisipatif dan akuntabel	1. Persaingan perdagangan bebas Asean Economic Community dan ACFTA 2. Menurunnya Produksi minyak Riau dan berkurangnya Dana bagi Hasil 3. Belum optimalnya koordinasi antar SKPD dalam perencanaan pembangunan daerah 4. Belum sinkronnya implementasi peraturan pusat dan daerah
Kekuatan (Strength - S)	Strategi S - O	Strategi S - T
1. Kuantitas aparatur yang memadai untuk mencapai terwujudnya visi dan misi BAPPEDA 2. Sarana dan prasarana serta lingkungan kerja yang memadai 3. Alokasi anggaran yang memadai	1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencanaan 2. peningkatan kualitas koordinasi dengan dengan para pemangku kepentingan	1. Pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah 2. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan sistem perencanaan
Kelemahan (Weakness - W)	Strategi W - O	Strategi W - T
1. Keahlian dan ilmu pengetahuan aparatur belum variatif sesuai kebutuhan tupoksi masing-masing bidang 2. Sistem informasi perencanaan belum memadai dan data dan informasi yang belum akurat 3. Mekanisme dan pola kerja setiap bidang belum tertata dengan efektif dan efisien	1. Peningkatan capacity building SDM perencana 2. Penguatan metodologi perumusan kebijakan dan inovasi teknologi	1. Penguatan metodologi perumusan kebijakan dan inovasi teknologi 2. Mengembangkan system informasi perencanaan, tata ruang berbasis web GIS, e-planning dan e-monev

Berdasarkan analisis SWOT, maka arah kebijakan dan strategi yang akan dilakukan dalam periode 2014-2018 adalah sebagai berikut :



Tabel 4.5 : Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : “Mewujudkan Rencana Pembangunan Provinsi Riau Yang Berkualitas melalui Lembaga Perencana yang Profesional dan Berintegritas”			
Misi 1 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah melalui koordinasi, fasilitasi, sinkronisasi, dan pengendalian di seluruh bidang	meningkatnya kualitas dokumen perencanaan dari segi ketepatan waktu serta sinkronisasi antar dokumen perencanaan	• peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan • Penguatan metodologi perumusan kebijakan dan inovasi teknologi • Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan sistem perencanaan	• Peningkatan kualitas pelaksanaan konsultasi publik dan Musrenbang daerah • Meningkatkan kualitas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan
Misi 2 : Meningkatkan kompetensi aparatur perencana serta kapasitas kelembagaan menuju lembaga perencana yang profesional			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	• Meningkatkan kompetensi aparatur perencana • Peningkatan capacity building SDM perencana	• Pendidikan dan pelatihan kompetensi • Peningkatan stratifikasi Pendidikan aparatur dalam dan luar negeri • Pelaksanaan reformasi birokrasi secara konsisten dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja (better performance) lembaga dan aparatur.
Misi 3 : Peningkatan pengelolaan data perencanaan yang valid serta dapat dipertanggung jawabkan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
Meningkatkan sistem pengelolaan data, statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan.	• pengembangan sistem dan kualitas data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; • Mengembangkan sistem informasi perencanaan, tata ruang berbasis web GIS, e-planning dan e-monev	• Pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi Tekstual dan Spasial berbasis elektronik. • Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta pengelolaannya dalam rangka mendukung peningkatan kinerja lembaga dan pegawai.



Strategi untuk melaksanakan kebijakan dan program di atas, selain disusun dengan mengacu kepada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, juga memperhatikan potensi dan permasalahan yang telah diuraikan dalam Bab terdahulu dan penentuan strategi (penentuan terlampir) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi aparatur perencana;
2. Peningkatan capacity building SDM Perencana;
3. Peningkatan kualitas koordinasi dengan para pemangku kepentingan;
4. Penguatan metodologi perumusan kebijakan dan inovasi teknologi;
5. Penguatan kelembagaan perencanaan pembangunan daerah melalui penataan sistem perencanaan;
6. Pengembangan sistem dan kualitas data serta informasi perencanaan pembangunan daerah;
7. Mengembangkan sistem informasi perencanaan, tata ruang berbasis web GIS, e-planing, dan e-monev.



RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai lembaga atau instansi perencanaan, penetapan rencana program dan kegiatan prioritas beserta indikator kinerja Bappeda disesuaikan dengan RPJMD Provinsi Riau periode 2014-2019. Penetapan program-program yang termuat dalam Renstra Bappeda Provinsi Riau disesuaikan dengan fungsi dan urusan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta peraturan perundangan terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda. Program dan kegiatan prioritas dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Bappeda Provinsi Riau dalam proses perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi.

Adapun program-program dalam kerangka pelaksanaan Misi Renstra Bappeda 2014-2019 adalah:

1. Misi ke-1:
 - a) Program Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Misi ke-2:
 - a) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - b) Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah



- c) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- d) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- e) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- f) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- g) Program Kerjasama Pembangunan

3. Misi ke-3:

- a) Program Pengembangan data/informasi

Sembilan program tersebut dengan indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) masing-masing diharapkan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Bappeda Provisni Riau lima tahun ke depan. Indikator kinerja adalah suatu ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif dan kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja input, outputs, outcomes, benefit dan impacts sesuai dengan sasaran rencana. Selain itu indikator kinerja juga berfungsi

1. Sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja dalam tahap perencanaan (ex-ante), tahap pelaksanaan (on-going), atau setelah tahap kegiatan selesai dan berfungsi (ex-post).
2. Sebagai ukuran yang digunakan untuk menunjukkan kemajuan yang dicapai dalam perwujudan dari tujuan sasaran yang ditujukan.

Adapun rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif disajikan pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2 berikut ini.



Tabel 5.2.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif BAPPEDA Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	Persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase kualitas perencanaan pembangunan daerah	85%	9.275	87%	8.374	90%	10.723	90%	80.005
			Penyusunan Rancangan RKPD	Jumlah Dokumen RKPD yang menjadi Pergub RKPD	2 Dokumen RKPD	600	2 Pergub RKPD	436	2 Pergub RKPD	455	100%, 4 dokumen, 6 dokumen RKPD, 4 Pergub RKPD	3.667
			Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	Capaian persentase Musrenbang Provinsi Riau yang berkualitas	1 Paket Rancangan Renja	800	90%	751	90%	783	100%, 2 dokumen, 1 Paket Rancangan Renja, 90%	5.259
			Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Dokumen Pelaksanaan Pembangunan APBD dan APBN Provinsi Riau yang dievaluasi	4 Dokumen	600	2 Dokumen	184	2 Dokumen	192	100%, 17 dokumen	3.062
			Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah di Provinsi Riau	Buku dan Data Evaluasi Perencanaan Pembangunan di Provinsi Riau	1 Dokumen	500	1 dokumen	222	1 dokumen	254	6 Dokumen	2.483
			Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen usulan Program dan kegiatan Daerah APBN	Dokumen Usulan	700	1 set Dokumen Usulan APBN	469	1 set Dokumen Usulan APBN	490	100%, 2 dokumen usulan, 2 set dokumen usulan APBN	4.584
			Verifikasi, Analisis dan Penyelarasan Dokumen Perencanaan RPJP dan RPJMD Kabupaten / Kota	Dokumen Perencanaan RPJP dan RPJMD Kabupaten/Kota yang diverifikasi dan diselaraskan	12 Kabupaten/Kota	550	2 Dokumen	104	1 Dokumen	109	Dokumen Perencanaan, 3 dokumen, 12 Kabupaten/ Kota	1.947
			Penyiapan Materi/Paparan/Makalah Pimpinan Terkait Perencanaan Pembangunan di Provinsi Riau	Rentang Waktu pemenuhan kebutuhan penyusunan pidato, pengarahan dan presentasi terkait perencanaan pembangunan daerah	12 Bulan	200	12 Bulan	150	12 Bulan	200	100%, 1 kegiatan, 12 bulan	2.205

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	Persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Riau	Dokumen Data dan Analisa tentang Evaluasi kinerja Pembangunan Daerah	1 Dokumen	500	1 Dokumen	235	1 Dokumen	292	4 dokumen	1.609
			Pembinaan dan Fasilitasi Penyusunan Dokumen Perencanaan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota	Laporan hasil asistensi	1 Dokumen	415	1 Dokumen	56	1 Dokumen	58,50	4 dokumen	1.279
			Asistensi Evaluasi dan Sinkronisasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah nya di Evaluasi	1 Dokumen	400	12 Kabupaten/Kota	233	12 Kabupaten/Kota	290	2 Dokumen, 12 Kabupaten/Kota	1.444
			Akselerasi Pencapaian Program Kependudukan dan KB di Provinsi Riau	Persentase Peningkatan Akselerasi Pencapaian Program Kependudukan dan KB Di Provinsi Riau				387	-	400	120 orang	787
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi lingkup bidang ekonomi dan sumber daya alam yang dilaksanakan			1 Kegiatan	700	1 Kegiatan	750	se-provinsi Riau	1.450
			Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau	Dokumen Rekomendasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Riau			1 Dokumen	350	1 Dokumen	400	2 dokumen	750
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau	Jumlah Kabupaten yang dimonitor dan dievaluasi dalam pelaksanaan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau			12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	400	12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	450	12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau	850
			Monitoring dan Evaluasi RAN-HAM	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Riau			1 Laporan	160	1 Laporan	200	2 laporan	360

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	Persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Paket Dokumen KUA dan PPAS Provinsi Riau yang menjadi PERDA	-	-	2 Paket Dokumen	480	2 Paket Dokumen	500,14	100%, 4 dokumen, 2 paket dokumen	2.755
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	-	-	1 Dokumen	1.000	1 Dokumen	1.000	2 Dokumen	2.000
			Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau	Jumlah Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota	-	-	13 Laporan	330	13 Laporan	350	26 Laporan	680
			Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Dokumen Perencanaan Bappeda Provinsi Riau yang disinkronisasi	-	-	3 Dokumen	200	3 Dokumen	250	6 Dokumen	450
			Sistem Informasi Data SDGs	Sistem data SDGs yang dapat diakses dan digunakan oleh stakeholder	-	-	1 Sistem Informasi Data SDGs	250	1 Sistem Informasi Data SDGs	200	2 Sistem Informasi Data SDGs	450
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Monitoring Evaluasi SDGs	Jumlah dokumen/draf/RAD SDGs Kabupaten/Kota	-	-	4 Dokumen/ Draft	500	4 Dokumen/ Draft	500	8 Dokumen/ Draft	1.000
			Asistensi dan Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Riau yang terverifikasi	-	-	1 Dokumen	250	1 Dokumen	300	2 Dokumen	550
			Kajian Teknokratik RPJMD Provinsi Riau	Dokumen Kajian Teknokratik Dokumen RPJMD Provinsi Riau	-	-	1 Dokumen	365	-	-	1 Dokumen	365
			Penyusunan Background Study RPJMD Provinsi Riau	Dokumen Draft Rancangan Awal RPJMD Provinsi Riau Tahun 2020 - 2024	-	-	1 Dokumen	162	-	-	1 Dokumen	162
			KLHS Penyusunan RPJMD Provinsi Riau	Tersedianya KLHS Penyusunan RPJMD Provinsi Riau	-	-	-	-	1 Dokumen	600	1 Dokumen	600

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	Persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Dokumen RPJMD Provinsi Riau	Jumlah dokumen RPJMD yang disusun	-	-			1 Dokumen	500	1 Dokumen	500
			Musrenbang RPJMD Provinsi Riau	Musrenbang RPJMD Provinsi Riau 2020-2024 yang berkualitas	-	-	-	-	1 Kegiatan	400	1 Kegiatan	400
			Penetapan dan Sosialisasi RPJMD Provinsi Riau	RPJMD Provinsi Riau yang di PERDAkan dan disosialisasikan	-	-	-	-	1 Kegiatan	500	2 Kegiatan	1.350
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan	Bersinerginya Perencanaan Pembangunan Bidang Penelitian dan Kerjasama Pembangunan Dengan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota	11 Kab/Kota	500	-	-	-	-	3 dokumen. 11 kab/kota	1.820
			Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sumberdaya aparatur	Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Bidang Sumberdaya Aparatur	1 Dokumen	585	-	-	-	-	2 dokumen, 1 kegiatan	1.835
			Sinkronisasi RKPD Kabupaten/Kota	Dokumen Sinkronisasi RKPD Kabupaten/Kota	12 Dokumen	650	-	-	-	-	13 dokumen	1.275
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau	Dokumen Percepatan Program Reformasi Birokrasi di Provinsi Riau	1 Dokumen	300	-	-	-	-	2 dokumen	700
			Koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BAPPEDA Provinsi Riau Tahun 2018	2 Dokumen	275	-	-	-	-	4 Dokumen	525
			Pengendalian dan Evaluasi RKPD Provinsi Riau	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Hasil RKPD Provinsi Riau	1 dokumen	500	-	-	-	-	1 dokumen	500
			Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Perumahan dan Permukiman Provinsi Riau	1 Kegiatan	250	-	-	-	-	1 Kegiatan	250

[illegible]

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	Persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJP Provinsi Riau Sampai dengan tahun 2014	Terlaksanya Evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Provins Riau sampai dengan Tahun 2014	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	500
			KLHS Penyusunan RPJPD Provinsi Riau	Tersedianya KLHS Penyusunan RPJPD Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	980
			Review RPJMD Provinsi Riau	Terlaksananya Review RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019	-	-	-	-	-	-	1 Kegiatan	350
			Musrenbang RPJMD Provinsi Riau	Terlaksananya Musrenbang RPJMD Provinsi Riau 2014-2018	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	960
			Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Riau	Tersusunnya Rancangan Akhir RPJMD Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	980
			Penetapan RPJMD Provinsi Riau	Tersedianya PERDA RPJMD Provinsi Riau 2014-2018	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	600
			Sosialisasi Peraturan Daerah RPJMD Provinsi Riau	Tersosialisasi PERDA RPJMD Provinsi Riau 2014-2018	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	430
			Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur Provinsi Riau	Tersedianya data dan informasi terhadap pelaksanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	350
			Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) Ke Kab/Kota se- Provinsi Riau	Terlaksananya Sosialisasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) se Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	100%	500
			Penyusunan peraturan daerah RTRW Provinsi Riau	Tersusunnya Peraturan Daerah RTRW Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	100%	1.500
			Revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019	Terlaksananya Revisi RPJMD Provinsi Riau 2014 - 2019	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	900
			Kajian Pengembangan Kawasan dan Kewilayahan	Tersusunnya Kajian Pengembangan kawasan dan kewilayahan Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	1.200

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	Persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	PROGRAM PENATAAN RUANG			-		-	-	-		3.000
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kuala enok - Pulau Burung	Tersedianya Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Kuala enok - Pulau Burung	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	750
			Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Industri Tenayan	Tersedianya dokumen RDTR Kawasan Strategis Industri Tenayan	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	750
			Pengendalian dan Monev pemanfaatan ruang	terlaksananya pengendalian dan monev pemanfaatan ruang	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	1.500
			PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG	Persentase kualitas perencanaan pembangunan daerah	100%	1.000	-	-	-	-	100%	1.000
			Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang	Terlaksananya Koordinasi, Pembinaan dan Pengendalian Rencana Tata Ruang	1 dokumen	1.000	-	-	-	-	1 dokumen	1.000
			PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI	Persentase kualitas perencanaan pembangunan daerah	100%	1.321	-	-	-	-	100%	7.636
			Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Riau	Terkoordinasinya Penanggulangan Kemiskinan di Provinsi Riau	1 Dokumen	350	-	-	-	-	100%, 12 kab/kota, 2 dokumen	2.402
			Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Lingkup Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	12 Kabupaten/Kota	521	-	-	-	-	Provinsi Riau, 1 dokumen, 12 kab/kota	2.123
			Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau	1 Dokumen	450	-	-	-	-	100%, 2 dokumen	961

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	Persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Bidang Kemaritiman di Provinsi Riau	Tersedianya Dokumen Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	500
			Penyusunan RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau	Jumlah dokumen RAD Pangan dan Gizi Provinsi Riau dan Laporan evaluasi pelaksanaan tahun berjalan	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	400
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian Percepatan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia di Provinsi Riau	Terkoordinasinya Perencanaan berupa Action Plan MP3EI di Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	100%	200
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Tercapainya Upaya target RAD Pangan dan Gizi (dalam bentuk laporan)	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	450
			Koordinasi perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi & SDA	Koordinasi bidang ekonomi dan sumberdaya alam	-	-	-	-	-	-	100%	600
			PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL BUDAYA	Persentase kualitas perencanaan pembangunan daerah	100%	2.700	-	-	-	-	100%	10.141
			Akselerasi Pencapaian Program Kependudukan dan KB di Provinsi Riau	Terlaksananya Koordiansi Lintas Sektor dan Lintas Program dalam Rangka Pengendalian Kependudukan dan KB di Provinsi Riau	60 orang	400	-	-	-	-	220 orang	1.050
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan SDGs	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Singkronisasi Pembangunan SDGs	12 Kab/Kota	650	-	-	-	-	12 Kab/Kota	650
			Monitoring dan Evaluasi RAN-HAM	Jumlah Laporan monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di Provinsi Riau	1 Laporan	250	-	-	-	-	1 Laporan	250

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	Persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Dan Budaya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial Budaya	1 Dokumen	850	-	-	-	-	100%, 3 dokumen	3.050
			Monitoring dan Evaluasi Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau	Jumlah Laporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Provinsi Riau	13 Laporan	550	-	-	-	-	12 kab/kota, 13 laporan	1.991
			Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan dan Target MDGs Provinsi Riau	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Percepatan Pencapaian Tujuan dan Target MDGs Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	100%, Provinsi Riau dan 12 Kab/Kota se Provinsi Riau	1.100
			Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Riau	Terkendalnya Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	100%	400
			Evaluasi Pencapaian dan Target MDGs Provinsi Riau	Tercapainya Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pencapaian Target MDGs Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	12 Kab/Kota	350
			Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)	-	-	-	-	-	-	7 Kabupaten/ Kota	450
			Pengendalian Pelaksanaan Program Asistensi Sosial Lanjut Usia di Provinsi Riau	Terwujudnya Pengendalian Program Asistensi Sosial Lanjut Usia di Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	12 Kabupaten/ Kota	350
			Fasilitasi dan Asistensi Pembangunan Pasca MDGs 2015	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Bidang Sosial Budaya	-	-	-	-	-	-	12 Kab/Kota	500
			PROGRAM PERENCANAAN PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER DAYA ALAM	Persentase kualitas perencanaan pembangunan daerah	100%	254	-	-	-	-	100%	2.104

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	Persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan dan Energi	Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perkebunan, Kehutanan dan Pertambangan dan Energi	Laporan	254	-	-	-	-	2 laporan	554
			Penguatan Pusat Data Spasial Provinsi Riau Penunjang Kegiatan Pengelolaan Sumberdaya Alam, Pesisir dan Laut	Terkelolanya Data Spasial SDA pesisir melalui web GIS Badan Informasi GeoSpasial dan Tersedianya SDM pengelola data spasial di Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	100%	200
			Valuasi ekonomi lahan gambut di Provinsi Riau	Teridentifikasinya nilai ekonomi lahan gambut di Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	100%	600
			Penyusunan Neraca Sumberdaya Alam Daerah	Dokumen perencanaan Sumber daya Alam	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	750
			PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOTA - KOTA MENENGAH DAN BESAR	Persentase kualitas perencanaan pembangunan daerah	-	-	-	-	-	-	100%	1.600
			Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan PNPM Provinsi Riau	Terlaksananya Pendampingan Kegiatan PNPM Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	350
			Pelaksanaan Koordinasi Program PAMSIMAS Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi Program PAMSIMAS Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	100%, 1 dokumen	625
			Pelaksanaan Koordinasi Program RIS-PNPM Provinsi Riau	Terlaksananya Koordinasi Program RIS-PNPM Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	100%, 1 kegiatan	625

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan	Persentase peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah Provinsi Riau Antar Daerah dan Antar Negara	Terkoordinasinya Kerjasama Pembangunan Daerah Prov. Riau, antar Daerah dan Antar Negara	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	1.200
			Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah dan Konsultasi Regional Operasi Pemeliharaan Pengairan	Terlaksananya Koordinasi Kerjasama Pembangunan Daerah dan Konsultasi Regional Operasi Pemeliharaan Pengairan	-	-	-	-	-	-	100%	300
			Penyusunan Data dan Informasi Objek Kerjasama Pembangunan antar daerah dan Provinsi Riau	Tersusunnya Data dan Informasi Objek Kerjasama Pembangunan antar Daerah dan Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	2 dokumen	1.050
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase meningkatnya kualitas sumberdaya aparatur sipil negara	93%	550	100%	500	100%	599	100%	2.802
			Pendidikan dan Pelatihan Formal	Rentang waktu pemenuhan Pendidikan dan Pelatihan Formal untuk Pegawai	12 bulan	550	12 bulan	500	12 bulan	599	100%, 190 orang, 12 bulan	2.245
			Sosialisasi PP 46 Tahun 2010 tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS	Tersosialisasinya dan terlaksananya penilaian prestasi kerja PNS	-	-	-	-	-	-	100%	137
			Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Aparatur Perencana	Terlaksananya Kemampuan Bahasa Inggris Aparatur Perencana	-	-	-	-	-	-	100%	200
			Analisis Penyempurnaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan Bappeda Provinsi Riau	Tertatanya Analisis Jabatan, Peta Jabatan & ABK di Bappeda Provinsi Riau dengan Baik dan Benar	-	-	-	-	-	-	2 Dokumen (Anjab, Peta jabatan & ABK)	220

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Persentase meningkatnya kualitas dan disiplin aparatur	92%	660	100%	164	1,00	194	100%	2.260
			Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Rentang waktu pemenuhan penyelenggaraan kegiatan jasmani dan rohani pegawai sebagai abdi negara	12 Bulan	164	12 Bulan	164	12 Bulan	194	100%, 1 SKPD, 12 bulan	1.007
			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas untuk pegawai Bappeda Prov. Riau	170 stel	172	-	-	-	-	510 stel	550
			Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Tersedianya pakaian batik tradisional untuk pegawai Bappeda Prov. Riau	170 stel	152	-	-	-	-	340 stel	332
			Pengadaan pakaian Melayu dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian melayu untuk pegawai Bappeda Prov. Riau	170 stel	172	-	-	-	-	170 stel	172
			Pengadaan pakaian Olahraga dan perlengkapannya	Tersedianya pakaian Olahraga untuk pegawai Bappeda Prov. Riau	-	-	-	-	-	-	170 stel	198
			PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase layanan administrasi perkantoran yang baik	90%	10.144	100%	8.714	100%	8.968	100%	58.750
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rentang Waktu Pemenuhan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Di Bappeda Provinsi Riau	12 Bulan	204	12 bulan	103	12 bulan	113	100%, 23050 lembar, 6000 lembar perangko, dan 24 paket pengiriman, 12 bulan	925
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rentang Waktu Pemenuhan penyediaan Sarana Komunikasi, Air dan Listrik di Bappeda Provinsi Riau	12 Bulan	946	12 bulan	950	12 bulan	1.000	100%, 12 Bulan untuk biaya telepon, listrik, biaya internet, biaya TV berlangganan	5.648

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rentang Waktu Pemenuhan Penyedian Jasa Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Bappeda Provinsi Riau	12 bulan	526	12 bulan	200	12 bulan	220	100%, 1 SKPD, 12 bulan	2.058
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Bappeda Bappeda Provinsi Riau yang dipelihara dan diurus perizinannya	12 Bulan	569	12 bulan	570	12 bulan	627	100%, Kendaraan Dinas 1 SKPD, 12 bulan	3.668
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang Waktu pemenuhan penyediaan Jasa Kebersihan Kantor di Bappeda Provinsi Riau	12 Bulan	747	12 bulan	687	12 bulan	750	100%, 1 SKPD, 12 bulan	4.298
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang Waktu Pemenuhan Alat Tulis Kantor di Bappeda Provinsi Riau	12 Bulan	200	12 Bulan	200	12 Bulan	220	100%, 1 SKPD, 12 bulan	1.538
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rentang Waktu Pemenuhan penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan di Bappeda Proinsi Riau	12 Bulan	475	12 bulan	445	12 bulan	490	100%, 1 SKPD, 12 bulan	3.378
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Jumlah Kebutuhan komponen listrik dan Penerangan Bangunan Kantor yang terpenuhi	12 Bulan	445	100%	400	1,00	440	100%, 1 SKPD, 12 bulan	3.530
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	1.142	100%	700	1,00	750	100%, 1 SKPD, 12 bulan	5.297
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Paket Bahan Bacaan untuk Pegawai	12 Bulan	60	1 Paket Bahan Bacaan	60	1 Paket Bahan Bacaan	60	100%, 1 SKPD, 12 bulan, 1 paket bahan bacaan	772

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencanaan	Meningkatnya kompetensi aparatur perencanaan	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Persentase kecukupan sarana dan prasarana kerja aparatur yang sesuai dengan standar kerja	88%	4.079	100%	1.083	1,00	1.200	100%	15.616
			Pengadaan Mebeleur	persentase pemenuhan kebutuhan mebeleur perlengkapan gedung kantor Bappeda	12 Bulan	330	100%	250	100%	275	100%, 1 SKPD, 1 Paket, 12 bulan	1.634
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	gedung kantor Bappeda yang dipelihara	12 Bulan	266	1 Gedung kantor	200	1 Gedung kantor	220	100%, 12 bulan, 1 Gedung Kantor	1.106
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Dipelihara per tahun	12 Bulan	193	13 Mobil jabatan	193	13 Mobil jabatan	200	100%, 12 bulan,13 mobil jabatan	1.309
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas /operasinal Bappeda Provinsi Riau yang dipelihara per Tahun	12 Bulan	390	6 Mobil jabatan	390	6 Mobil jabatan	450	100%, 12 bulan, 6 mobil jabatan	2.428
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Rentang Waktu Pemenuhan Penyediaan Jasa pemeliharaan mebeleur kantor Bappeda Povinsi Riau	12 Bulan	100	12 Bulan	50	12 Bulan	55	100%, 12 bulan	615
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung kantor Bappeda yang direhabilitasi	1 gedung	2.800	-	-	-	-	1 Gedung Kantor	2.800
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	100%, 12 bulan	420
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	-	-	-	100%, 12 bulan	420
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor Bappeda Prov. Riau	-	-	-	-	-	-	100%, 1 SKPD	1.331
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Meningkatnya Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-	-	100%, 1 SKPD	1.494

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	1. Jumlah akreditasi/standarisasi pelayanan perencanaan, 2. Jumlah aparatur perencana yang mengikuti diklat perencanaan	Standarisasi : 1 ; Orang : 25	3.300	Standarisasi : 1 ; Orang : 25	2.463	Standarisasi : 1 ; Orang : 25	2.868	Standarisasi : 1 ; Orang : 25	29.663
			Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	Jumlah Pemenuhan Konsultasi, Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan program bidang infrastruktur dan lingkungan hidup	1 Laporan	1.000	1 kegiatan	1.500	1 kegiatan	1.500	1 paket, 1 dokumen, 1 laporan, 2 kegiatan	5.400
			Pelaksanaan Pokja RAD-GRK dan Koordinasi Pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau	Dokumen Laporan Pelaksanaan Pokja RAD-GRK dan Koordinasi Pelaksanaan REDD+ di Provinsi Riau	2 Dokumen	300	1 kegiatan	250	1 kegiatan	300	3 dokumen, 2 kegiatan	1.350
			Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur jabatan fungsional perencana	Jumlah Aparatur Jabatan fungsional perencana yang meningkat kapasitasnya	30 orang	500	30 orang	425	30 orang	468	150 orang	1.993
			Peningkatan Kerjasama Fasilitas dan Fungsi Cagar Biosfer Giam Kecil Bukit Batu	Laporan Kegiatan Peningkatan Kerjasama Fasilitas dan Fungsi Cagar Biosfer Giam Siak Kecil Bukit Batu di Provinsi Riau	-	-	1 dokumen	288	1 dokumen	600	2 dokumen	888
			Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana	Jumlah Aparatur Yang Mengikuti Diklat Perencanaan Pembangunan Daerah	25 Orang	1.100	-	-	-	-	50 orang, 1 angkatan	3.450
			Penerapan, Evaluasi dan Audit ISO 9001:2008 Bappeda Provinsi Riau	Dokumen standar operasional prosedur Bappeda Provinsi Riau dan terlaksananya Penerapan ISO 9001 : 2008 Bappeda Provinsi Riau	1 Dokumen	250	-	-	-	-	3 dokumen, 1 kegiatan	1.319

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Peningkatan kualitas dan kapasitas kelembagaan dan aparatur perencana	Meningkatnya kompetensi aparatur perencana	Jumlah Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi	Updating Sistem Manajemen Kepegawaian Bappeda Provinsi Riau	Jumlah aparatur perencana yang mengikuti berbagai pendidikan	1 sistem	150	-	-	-	-	1 sistem	150
			Pelaksanaan Pokja RAD-GRK	Berfungsinya Kelompok Kerja (Pokja) RAD-GRK di Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 kegiatan	350
			Penyusunan Roadmap Sanitasi Provinsi Riau	Tersedianya Dokumen Roadmap Sanitasi Sebagai Pedoman Dalam Perencanaan Pembangunan Sanitasi di Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	250
			Peningkatan Kemampuan Teknis Tenaga Fungsional Perencana	Tersedianya pejabat fungsional perencana tingkat pertama	-	-	-	-	-	-	20 Orang	1.350
			Peningkatan Kemampuan Bahasa Inggris Aparatur Perencana	Terlaksananya Kemampuan Bahasa Inggris Aparatur Perencana	-	-	-	-	-	-	25 Orang	250
			Placement Test Jabatan Fungsional Perencana	Terlaksananya Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia perencana untuk diklat jabatan fungsional perencana	-	-	-	-	-	-	20 Orang	50
			Pelatihan Aplikasi Sistem Pelaporan e-Monev PP 39 Tahun 2006	Terlaksananya pelatihan aplikasi e-Monev terhadap aparatur Pemerintah Daerah yang menangani pelaporan APBN di Kab/Kota se- Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	96 orang	369
			Inhouse Training Pemantapan Kapasitas aparatur Bappeda Provinsi Riau	Meningkatkan kapasitas aparatur Bappeda Provinsi Riau dalam menjalankan Tupoksi	-	-	-	-	-	-	25 orang, 1 kegiatan	1.000

[illegible]

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Meningkatkan sistem pengelolaan data, statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI	Persentase ketersediaan data/informasi perencanaan pembangunan yang berkualitas	75%	4.130	77%	1.706	77%	2.332	80%	23.664
			Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Provinsi Riau	Data SIPD Provinsi Riau yang Updated	1 Dokumen	520	1 Dokumen	111	1 Dokumen	115,60	4 dokumen	1.282
			Peningkatan Jaringan Intranet di Bappeda Prov. Riau	Rentang Waku pemenuhan Jasa Layanan Intranet bappeda Provinsi Riau	1 Jaringan	500	12 Bulan	400	12 Bulan	600	100%, 1 tahun, 1 jaringan, 12 bulan	3.538
			Penerbitan Majalah Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Riau	Majalah Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau yang terbit	2 edisi	325	2 edisi	285	2 edisi	400	100%, 10 edisi	1.985
			Penyediaan Buku Agenda dan kalender Bappeda	Jumlah Buku Agenda dan kalender Bappeda untuk ASN Bappeda Provinsi Riau	Buku Agenda dan Kalender Bappeda	325	Buku Agenda dan Kalender Bappeda	206	Buku Agenda dan Kalender Bappeda	450	100%, 5 buku agenda, 5 kalender	1.831
			Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	Jumlah Penyelenggaraan Pameran Informasi / Data Pembangunan Provinsi Riau Pada Pameran / Expo	1 Pameran	185	1 Pameran	200	1 Pameran	220	100%, 4 pameran, 1 kegiatan	1.814
			Updating Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Riau	Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Riau yang Updated	1 Aplikasi	300	1 aplikasi	147	1 aplikasi	174	3 Aplikasi	621
			Pengelolaan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau	Aplikasi system informasi perencanaan pembangunan daerah	1 Sistem	500	1 sistem	357	1 sistem	372	3 Sistem	1.229
			Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi	Pelaksanaan koordinasi Bidang Statistik, Pelaporan dan Evaluasi	1 Dokumen	525	-	-	-	-	4 dokumen	1.815
			Pengelolaan Perpustakaan Bappeda Provinsi Riau	Persentase kualitas pengelolaan Pustaka Bappeda Provinsi Riau	1 pustaka dalam 12 bulan	300	-	-	-	-	1 pustaka dalam 12 bulan	724

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Meningkatkan sistem pengelolaan data, statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Pengelolaan Simpul Jaringan Geospasial Provinsi Riau	Dokumen Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Geospasial di Provinsi Riau	1 dokumen laporan	300	-	-	-	-	1 sistem, 1 Paket Kegiatan dan 3 Dokumen Laporan	1.500
			Pembangunan Aplikasi Database Pembangunan Provinsi Riau	Jumlah Aplikasi Database Pembangunan Provinsi Riau yang Updated	1 Aplikasi	350	-	-	-	-	1 Aplikasi	350
			Penyusunan data statistik Provinsi Riau	Tersedianya Data/Informasi Penyusunan Dokumen Perencanaan	-	-	-	-	-	-	19 dokumen	2.423
			Penyusunan Data Spasial Informasi Pembangunan Provinsi Riau	Terpetakannya Data dan Informasi tentang Pembangunan Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	15 Data Tematik	563
			Pembangunan Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau	upgrade Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	450
			Studi Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau	Terwujudnya pola dan pemetaan perencanaan pengembangan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	200
			Penyusunan Data dan Informasi Objek Kerjasama Pembangunan antar daerah dan Provinsi Riau	Tersusunnya Data dan Informasi Objek Kerjasama Pembangunan antar Daerah dan Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	400
			Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Kawasan Tertinggal, Terpencil dan Terluar di Provinsi Riau	Terlaksananya Penyusunan Rencana Tindak Penanganan Kawasan Tertinggal, Terpencil dan Terluar di Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	Kabupaten dan Kota se- Provinsi Riau	659

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan (Revisi Renstra)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra	
					2017		2018		2019			
					Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)	Target	Rp (juta)
Meningkatkan sistem pengelolaan data, statistik dan informasi perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya data yang lengkap sebagai dasar analisis perencanaan pembangunan	Jumlah data sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah	Upgrade Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau	upgrade Sistem Aplikasi Perencanaan Pembangunan Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 aplikasi, 1 sistem	356
			Penyusunan Profil Daerah Provinsi Riau	Tersusunnya Buku Profil Daerah Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	200 buku	300
			Pembangunan Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Riau	Meningkatnya kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah dalam penggunaan teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	1 Aplikasi	400
			Penyusunan Dokumen Data dan Informasi untuk Mendukung Penyusunan RKPD di Provinsi Riau	Tersedianya dokumen data dan informasi untuk mendukung penyusunan RKPD Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	3 Dokumen	784
			Pendamping Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kemendagri	Tersediannya Data SIPD Provinsi Riau	-	-	-	-	-	-	1 Dokumen	441
			TOTAL		39.008		23.055		26.937		253.460	

INDIKATOR KINERJA BAPPEDA PROVINSI RIAU MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN PERUBAHAN RPJMD PROVINSI RIAU 2014-2019

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Penetapan indikator kinerja BAPPEDA untuk memberikan gambaran ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi BAPPEDA Provinsi Riau, yang secara khusus mengukur keberhasilan pembangunan dari sisi Perencanaan Pembangunan yang berkualitas, melalui lembaga yang profesional dan berintegritas.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan BAPPEDA, harus ditetapkan secara cermat dengan memperhatikan kondisi riil saat ini serta memperhatikan berbagai pertimbangan yang mempengaruhi kinerja BAPPEDA kedepan baik pengaruh dari luar (external) maupun dari dalam (internal) BAPPEDA.

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Perangkat Daerah.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau disusun dengan maksud dan tujuan :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Riau merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan



sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Bappeda Provinsi Riau. Adapun Tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD yang didukung pencapaiannya oleh indikator kinerja Bappeda Provinsi Riau adalah sebagai berikut :

Misi 5 : Mewujudkan Pemerintahan Yang Handal dan Terpercaya	
Tujuan	Sasaran
Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan dengan sinkronnya antar dokumen perencanaan

Berdasarkan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun sebelumnya serta indikator kinerja BAPPEDA Provinsi Riau yang menjadi pendukung terhadap capaian tujuan dan sasaran dalam dalam Perubahan RPJMD maka secara rinci indikator kinerja untuk lima tahun 2014 – 2019 dapat diuraikan dalam Tabel 6.1 sebagai berikut:

Tabel 6.1 Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Persentase Peningkatan Kualitas Rencana Dokumen Pembangunan Daerah	-	70 %	75 %	80 %	85 %	87 %	90 %	90 %



Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2014-2019 ini merupakan pengejawantahan dari Rancangan Akhir Perubahan RPJMD Provinsi Riau 2014 – 2019 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, 2015 dan 2016, berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur BAPPEDA dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan Pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Perubahan Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi BAPPEDA Provinsi Riau yang mengacu pada Rancangan akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau Tahun 2014-2019 dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014, 2015 dan 2016.

Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh aparatur BAPPEDA Provinsi Riau, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Perubahan Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau ini dapat dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan - tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya good governance.

